



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI  
DENGAN IRJEN, KEPALA BPSDM, KEPALA BPIW  
KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 9 (Sembilan)  
Jenis Rapat : RDP  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022  
Waktu : Pukul 10.20 s.d. 15.25 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI dan secara virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Roberth Rouw (F-P. NASDEM) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022.  
2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2023.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
44 dari 55 orang Anggota dengan rincian:  
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
9 dari 11 orang Anggota  
1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.  
2. Mochamad Herviano  
3. Sukur H. Nababan, S.T.  
4. Ir. Sudjadi  
5. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.  
6. Sri Rahayu  
7. H. Irmadi Lubis  
8. Ir. Effendi Sianipar  
9. Harvey B. Malaihollo  
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
7 dari 8 orang Anggota  
1. Ir. Ridwan Bae  
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.  
3. Cen Sui Lan  
4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.  
5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.  
6. Muhammad Fauzi, S.E.

7. Ir. H. Anang Susanto, M.Si
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
6 dari 7 orang Anggota
  1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
  2. Ir. Sumail Abdullah
  3. Sudewo, S.T., M.T.
  4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
  5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
  6. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
5 dari 6 orang Anggota
  1. Roberth Rouw
  2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
  3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
  4. Sri Wahyuni
  5. Drs. Fadholi, M. Ikom.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)  
5 dari 6 orang Anggota
  1. H. Ruslan M. Daud
  2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
  3. Sofyan Ali, S.H.
  4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
  5. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
4 dari 5 orang Anggota
  1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
  2. Willem Wandik
  3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
  4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)  
2 dari 5 orang Anggota
  1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
  2. KH. Toriq Hidayat, Lc.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)  
4 dari 5 orang Anggota
  1. H.A. Bakri H. M., S.E.
  2. Athari Ghauthi Ardi
  3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

4. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Ir. T. Iskandar, M.T.)
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Dr. Ir. Khalawi AH, M.Sc., M.M., IPU)
3. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA  
KOMISI V DPR RI:**

Kita mulai ya, baik.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Saudara Irjen, Kepala Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik  
Indonesia beserta seluruh jajarannya,  
Serta hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat secara fisik dan virtual, dari tempat-masing.

Menurut laporan dari Sekretaris Komisi V DPR RI, saat ini Rapat Komisi V DPR RI telah diikuti oleh 22 orang dari 55 anggota dan terdiri dari lebih separuh unsur fraksi, yang telah memenuhi kuorum.

Oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.20 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Kami ucapkan terima kasih kepada Para Eselon I Kementerian PUPR beserta jajarannya, yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini secara fisik dengan agenda:

- membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022, dan
- alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

**Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI, dan  
Para Eselon I Kementerian PUPR yang kami hormati,**

Dari alokasi pagu tersebut, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal mendapat alokasi sebesar 90,26 miliar, yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan internal Kementerian PUPR. Sedangkan realisasi anggaran Inspektur Jenderal dalam APBN Tahun Anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 47,36%.

Sedangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh alokasi sebesar 339,76 miliar, yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan diantaranya: pelatihan ASN, pendidikan magister, pengembangan talenta, dan pendidikan vokasi politeknik PU. Sedangkan realisasi anggaran BPSDM pada anggaran tahun anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 55,36%.

Kemudian Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mendapat alokasi sebesar 140,76 miliar, yang akan dipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di antaranya: melakukan penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur PUPR berbasis wilayah yang mendukung pengembangan kawasan prioritas nasional dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PUPR di seluruh wilayah. Sedangkan realisasi anggaran BPIW dalam APBN Tahun Anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 44,55%.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali, agar dalam proses penyusunan pagu ini, agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI.

Selanjutnya berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari

Irjen, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW, antara lain perlunya meningkatkan pantauan terhadap tindak lanjut berbagai temuan hasil pengawasan audit kinerja maupun pengelolaan keuangan di lingkup Kementerian PUPR, antara lain:

1. melalui penyempurnaan SOP serta koordinasi antar sub sektor,
2. perlunya meningkatkan kapasitas SDM, keahlian bagi para ASN sesuai kompetensi dan spesialisasi di bidang masing-masing,
3. perlu meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan penajaman fokus, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Termasuk di koridor-koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

**Saudara-saudara yang kami hormati,**

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para Pejabat Eselon I Kementerian PUPR untuk menyampaikan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai bulan Agustus 2022, alokasi anggaran menurut fungsi dan program anggaran K/L 2023 masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Demikian pengantar dari kami.

Kami persilakan kepada Irjen dan Para Kepala Badan untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan Pak.

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
**Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,  
Salam kebajikan bagi kita semua,**

**Yang terhormat dan kami hormati Pimpinan Komisi,  
Bapak Ibu Anggota Komisi V DPR RI.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya ,kita dapat hadir dan masih diberikan sehat.

Sesuai dengan undangan rapat dengar pendapat, Inspektorat Jenderal akan menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan alokasi RAPBN 2023.

Sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, untuk DIPA awal Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 101,7 miliar dan mengikuti kebijakan pemerintah untuk dilakukan *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan berupa pencadangan anggaran sebesar 5 Miliar yang akan segera dilakukan pemotongan oleh Kementerian Keuangan, sehingga alokasi anggaran dapat digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern adalah sebesar 96,7 miliar.

Selanjutnya untuk progres realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022, Inspektorat Jenderal telah merealisasi sebesar 48,14 miliar atau lebih kurang sekitar 47,34 miliar dan realisasi fisik mencapai 49,53 miliar. Kondisi tersebut masih kurang daripada rencana, hal ini disebabkan karena kondisi pandemi masih berlangsung atau masih adanya kondisi pembatasan daripada pelaksanaan kegiatan, yang lebih banyak masih kita menggunakan secara *hybrid* atau rencana kegiatan di luar kantor masih dilakukan di lingkungan Kementerian PUPR.

Kebijakan pengawasan Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada tiga fokus,

- Yang pertama adalah pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR dengan tema “Pengawasan terhadap kegiatan direktif dan strategis serta pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR”.
- Kedua adalah pengawasan terhadap penatausahaan BMN di Kementerian PUPR dengan tema “Pengawasan terhadap perencanaan dan penatausahaan BMN di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR”.
- Ketiga adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan atas penyelenggaraan SPIP, penerapan manajemen risiko, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan, peningkatan kepatuhan dan integritas aparatur, serta peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan.

Di dalam rangka mengawal implementasi dari Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Koperasi dalam rangka menyukseskan kerangka, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, saat ini Inspektorat Jenderal telah lagi melaksanakan pengawasan implementasi P3DN sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern pada tanggal 14 Juni 2022.

Sejalan dengan masukan serta arahan dari Pimpinan, Anggota Komisi V pada rapat dengar pendapat tanggal 2 Februari 2022 terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN tahun 2021 dan Program Kerja Tahun 2022, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan langkah-langkah, berupa: pelaksanaan pemeriksaan implementasi P3DN sebagai bagian dari proses audit kinerja terhadap satuan kerja di Kementerian PUPR. Berupa pemeriksaan terhadap kepatuhan atas komitmen penggunaan produk dalam negeri tahun 2022 yang saat ini sedang berlangsung.

Peningkatan pemahaman auditor melalui *workshop* pemahaman P3DN bekerjasama dengan BPKP dan Kementerian Perindustrian pada bulan Maret

2022. Dan pada bulan September 2022 ini akan dilaksanakan pelatihan pengawasan implementasi P3DN bekerja sama dengan BPKP. Penyiapan pedoman evaluasi implementasi P3DN pada unit organisasi di Kementerian PUPR.

Evaluasi implementasi P3DN akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Oktober 2022 terhadap seluruh unit kementerian unit organisasi di Kementerian PUPR yang didahului dengan verifikasi komitmen PDN oleh Tim P3DN Kementerian PUPR, pada tahun 2022 saat ini.

Selanjutnya, realisasi pengawasan intern sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 telah dilaksanakan, berupa pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, pembangunan rumah susun, pembangunan prasarana PON Papua, audit yang tidak terprogramkan berdasarkan perintah Menteri PUPR, permohonan aparat penegak hukum dan unit organisasi, serta pengaduan masyarakat. Pelaksanaan *review* berupa *review* Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Tahun 2021, *review* Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun 2022 dan lain-lain.

Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi berupa evaluasi efektivitas, penerapan manajemen risiko, evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah, evaluasi internal unit usulan unit kerja, zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pelaksanaan pemantauan berupa pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya, yaitu berupa antara lain: pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung acara internasional di Provinsi Bali, NTB, NTT, dan DKI Jakarta, berupa penugasan kepada Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2021.

Pendampingan penanganan dampak bencana antara lain akibat siklon tropis di NTB dan NTT, dan erupsi daripada Gunung Semeru. Pendampingan pengendalian gratifikasi dan koordinasi kerja sama pengawasan pengamanan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR dengan Kejaksaan RI, Kepolisian, KPK dan BPKP.

Selanjutnya, untuk rencana pelaksanaan pengawasan intern sampai dengan tahun 2022, pelaksanaan audit berupa audit kinerja terhadap seluruh unit organisasi, audit dengan tujuan tertentu, meliputi program pemulihan ekonomi nasional pada bulan Desember, kegiatan dekonsentrasi tugas perbantuan bidang sumber daya air dan Bina Marga dan audit ketaatan berita acara BUN dan BNPB di tahun 2022. Audit yang tidak terprogramkan berdasarkan perintah Menteri PUPR, permohonan aparat penegak hukum dan unit organisasi.

Selanjutnya untuk pelaksanaan *review*, berupa *review* Laporan Keuangan Triwulan Ketiga tahun 2022, *review* RKA K/L Tahun 2023 atas Usulan Alokasi Anggaran Unit Organisasi.

Selanjutnya, *review* atas pencatatan aset dan konsesi pada 79 ruas jalan tol dan selanjutnya, yang lain-lainnya.

Pelaksanaan evaluasi berupa pelaksanaan telaah sejawat di intern, selanjutnya evaluasi kesiapan pembangunan ibukota negara, evaluasi implementasi P3DN dan lain-lain.

Pelaksanaan pemantauan berupa lanjutan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang merupakan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN. Selanjutnya, mendukung acara internasional persiapan G30 dan pendampingan penanganan dampak bencana.

Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan, sudah menghasilkan *output* pada semester pertama tahun 2022 dengan status sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 sebagai berikut:

- Untuk kondisi pengawasan audit, dengan rencana 175 laporan, yang sudah ditindaklanjuti/direalisasikan sebanyak 257. Hal ini diakibatkan akibat adanya tambahan dari pengawasan tidak terprogramkan dan mayoritas dilaksanakan di kantor, antara lain audit dengan tujuan tertentu dan penelitian awal, serta audit dengan tujuan tertentu, verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- Untuk *review* dari rencana, terealisasi 250 laporan, dan ini diakibatkan oleh *review* usulan revisi anggaran, usulan dana penanganan bencana, dan *review* terhadap usulan *multiyears contract*.

Selanjutnya, pemantauan dari kondisi rencana 180 kegiatan, terealisasi 246 kegiatan. Ini peningkatan didasari kepada peningkatan proses permintaan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan akibat persyaratan daripada *profiling* pejabat yang diusulkan.

Selanjutnya, pengawasan lainnya, dari rencana 95 terealisasi 120. Hal ini berupa pendampingan administrasi dan lapangan pelaksanaan kegiatan dukungan infrastruktur acara internasional G20 dan lain-lain, termasuk kegiatan pengawasan lainnya yang bersifat konsultasi.

Selanjutnya dalam hal akselerasi kegiatan pembangunan zona integritas, Inspektorat Jenderal dan unit organisasi lainnya terus berkomitmen untuk melakukan pembangunan zona integritas dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari bertambahnya unit kerja pembangunan zona integritas sebagai berikut, yaitu:

- Pada tahun 2018 sebanyak 4 unit kerja,
- Tahun 2019 sebanyak 5 unit kerja,
- Tahun 2020 sebanyak 8 unit kerja,
- Tahun 2021 sebanyak 41 unit kerja, dan



- Tahun 2022 sudah terdapat 133 unit kerja yang sudah masuk ke dalam predikat zona integritas. Pada tahun 2022 ini, kerja yang diusulkan untuk dilakukan penilaian tim penilaian sebanyak 8 unit kerja, di mana jumlah tersebut berdasarkan ketentuan dari surat Kementerian PAN RB tanggal 24 Mei 2022.

Selanjutnya, tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah bekerjasama dengan KPK untuk pelaksanaan survei penilaian integritas di Kementerian PUPR dengan hasil pada tahun 2019 dilakukan penilaian pertama, di mana Kementerian PUPR memperoleh nilai indeks 74,83 di mana nilai tersebut lebih rendah daripada nilai indeks nasional sebesar 76,98.

Dan pada tahun 2021, Kementerian PUPR memperoleh indeks 82,64 nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indeks rata-rata nasional sebesar 72,43. Hal ini mencerminkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada PUPR, Kementerian PUPR, relatif semakin baik.

Untuk tahun 2022, Kementerian PUPR dipilih oleh KPK sebagai *piloting* perluasan *sample* SPI 2022 bersama kementerian lain. Itupun mencerminkan tingkat kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kementerian PUPR.

Dalam hal pengendalian gratifikasi, Kementerian PUPR yang berkoordinasi, dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, memperoleh peringkat pertama dalam implementasi Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan Kedua Tahun 2022 dengan nilai 91,9. Sedang untuk penerapan manajemen risiko, Kementerian PUPR memperoleh peringkat dengan memperoleh level 4 dari skala 5, bersama tiga kementerian lainnya. Di mana nilai ini diperoleh berdasarkan penilaian BPKP, capaian ini merupakan salah satu hasil dari proses perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern di Kementerian PUPR, yang dimulai sejak tahun 2020. Upaya ini akan tetap dilanjutkan pada tahun 2022 dengan melaksanakan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan.

Laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Capaian ini merupakan wujud nyata dari Kementerian PU untuk senantiasa menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Secara tidak langsung Kementerian PUPR telah memberikan kontribusi pencapaian target daripada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau reformasi sistem akuntabilitas yang mencapai 95,45%.

Selanjutnya, untuk penuntasan temuan-temuan hasil laporan pemeriksaan BPK RI dari tahun ke tahun, trennya selalu meningkat. Yaitu pada tahun 2019, yang tuntas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan baru mencapai 56,98%. Pada tahun 2020, meningkat bertambah menjadi 60,38%. Pada tahun 2021, meningkat menjadi 65,70% dan pada tahun 2022 ini sementara baru

mencapai 67,11%, karena status tersebut belum final dan mengingat masih banyak rekomendasi yang telah ditindaklanjuti namun masih dalam proses penilaian oleh BPK RI.

Di dalam hal ini, Inspektorat Jenderal terus berkoordinasi dengan Asisten Operasi Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur berkaitan dengan pengamanan pembangunan infrastruktur ibukota negara. Koordinasi pengamanan dilakukan melalui kunjungan di lapangan seperti beberapa kegiatan yang dilakukan terhadap persiapan ibukota negara.

Selanjutnya untuk rencana RAPBN 2023, sesuai dengan tema RKP tahun 2023 yaitu "Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan", Inspektorat Jenderal berkomitmen melaksanakan pengawasan intern dan fokus pada tiga hal yang akan dituangkan dalam kebijakan pengawasan dan program kerja sama pengawasan tahun 2023. Yaitu:

- Yang pertama adalah pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR dengan tema "Pengawasan kegiatan direktif dan prioritas", antara lain kegiatan pembangunan ibukota negara, pembangunan proyek strategis nasional dan prioritas nasional, rehabilitasi dan rekon akibat bencana. Dan prioritas utama Kementerian PUPR tahun 2023 antara lain: Penyelesaian *multiyears contract*, pembayaran hutang pekerjaan, pembayaran eskalasi program padat karya, serta pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
- Yang kedua adalah pengawasan terhadap penatausahaan barang milik negara di Kementerian PUPR dengan tema "Pengawasan terhadap perencanaan dan penatausahaan barang milik negara di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR", termasuk pengawasan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pengelolaan barang milik negara.
- Yang ketiga adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik melalui pengawasan atas penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan, peningkatan kepatuhan integritas aparatur, serta peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan.

Untuk kondisi kronologi usulan pagu anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Indikasi kebutuhan penganggaran rencana strategis tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah senilai 129,9 miliar.
- Indikasi kebutuhan berdasarkan penghitungan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah 102,5 miliar.
- Pagu indikatif berdasarkan adalah 90,2 miliar dan usulan pagu anggaran, anggaran adalah tetap, senilai 90,29 miliar.
- Objek pengawasan tahun anggaran 2023 yang merupakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dengan jumlah auditor sebanyak 184 orang terhadap pengelolaan anggaran Kementerian PUPR sebesar 125,22

triliun yang dikelola oleh 10 unit organisasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui 186 UPT atau balai pada 689 satuan kerja dengan 2.441 pejabat pembuat komitmen.

- Inspektorat Jenderal juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemilihan pengawas pengadaan barang dan jasa.

Di samping itu juga rencana anggaran per jenis belanja di Inspektorat Jenderal dengan pagu anggaran tetap untuk tahun 2023 senilai 90,26 miliar adalah sebagai berikut:

- Belanja pegawai dan belanja barang sebesar 87,73 miliar yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan pegawai 42,49 miliar,
- Belanja barang sebesar 45,24 miliar, yang meliputi anggaran pengawasan intern sebesar 35,54 miliar untuk pelaksanaan audit *review* evaluasi pemantauan kegiatan pengawasan lainnya termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal,
- Dan kegiatan pengelolaan pengawasan intern dan lainnya senilai 94,7 miliar.
- Dan belanja modal senilai 2,53 miliar.

Selanjutnya, untuk pengelompokan rencana pagu anggaran tersebut secara konkrit dilaksanakan, meliputi:

- Pelaksanaan audit kinerja dengan audit dengan tujuan tertentu, senilai 11,21 miliar.
- Pelaksanaan *review* antara lain berupa *review* keuangan, usulan rencana BMN, usulan RKA K/L, usulan revisi dan lain sebagainya, sebesar 1,5 miliar.
- Pelaksanaan evaluasi antara lain SAKIP, evaluasi internal, birokrasi, evaluasi internal, dan sebagainya, senilai 3 miliar.
- Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal dan lain sebagainya pada permintaan unit organisasi, senilai 1,8 miliar.
- Kegiatan pelaksanaan pengawasan lainnya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sosialisasi bidang pengawasan dan koordinasi pengawasan sebesar 2,5 miliar.
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan wajib tingkat Kementerian PUPR antara lain berupa *review* keuangan Kementerian, *review* laporan kinerja Kementerian, *review* usulan RKA BMN senilai 1 miliar, kegiatan penelitian pengembangan pengawasan intern Kementerian PUPR sebesar 3,35 miliar.
- Selanjutnya untuk pengembangan sumber daya manusia, pengawasan di Inspektorat Jenderal dalam bentuk diklat, sertifikasi profesi jabatan fungsional, sosialisasi bidang pengawasan, senilai 5,7 miliar.
- Pengadaan sarana internal senilai 2,7, 2,5 miliar.
- Penyerahan dukungan pengawasan senilai 5,5 miliar.
- Dan pembayaran gaji tunjangan dan operasional sebesar 52,18 miliar.

Mungkin demikian,

**Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati,**

Yang bisa kami sampaikan di dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 dan rencana pagu anggaran tahun 2023 di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Kiranya di dalam kesempatan ini ada masukan dan arahan lebih lanjut dari Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang terhormat, di dalam pelaksanaan kegiatan maupun rencana pagu anggaran 2023.

Demikian.

*Wabillahitaufig walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik, lanjut.

Pak Kepala BPSDM, silakan.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr.  
Ir. KHALAWI AH, M.Sc., M.M., IPU):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,  
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya,*

**Yang saya hormati dan banggakan Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR  
RI,  
Serta teman-teman dari Unor Irjen dan BPIW,  
Dan hadirin yang saya muliakan.**

Izinkan saya menyampaikan realisasi APBN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 hingga bulan Agustus Tahun 2022.

Pagu alokasi anggaran BPSDM sebesar 350 miliar. Realisasi anggaran per 25 Agustus 2022 adalah sebesar 193,7 miliar atau 55,36% dari total anggaran. Dengan progres fisik sebesar 57,39%.

Capaian *output* kegiatan utama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Pertama, pengembangan talenta meliputi pelaksanaan *assessment* dengan capaian 2.125 orang, dari target 4.500 orang, atau 47,4%. Pemetaan karir dengan capaian 141 orang, dari target 249 orang, atau

56,62%. Dan pemantauan kinerja dengan capaian 20.243 orang, dari target 21.575 orang, atau 93,82%.

- Yang kedua adalah pelatihan meliputi pelatihan klasikal, nonklasikal, bimtek dan *workshop* dengan capaian 4.906 orang dari target 5.220 orang atau 93,98%.
- Yang ketiga adalah pendidikan meliputi pendidikan magister super spesialis, S1 Uncen dan D4 STAN, dengan capaian 531 orang, dari target 369 orang, atau 143,9%, melampaui target, serta pendidikan vokasi Politeknik PU dengan capaian 642 orang, dari target 580 orang atau melebihi target, menjadi 110,31%.

Kemudian upaya percepatan realisasi anggaran tahun 2022 antara lain adalah:

- Yang pertama, mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran,
- mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian dengan meningkatkan monitoring dan pengawasan serta yang lainnya,
- mempercepat pemanfaatan potensi pagu tidak terserap untuk program prioritas atau program yang mendesak.

Kemudian kegiatan yang telah dilaksanakan hingga bulan Agustus tahun 2022 antara lain adalah:

- Pertama, pelatihan teknis dan manajemen PUPR, telah dilaksanakan kepada 4.906 orang meliputi pelatihan bidang sumber daya air 734 orang, bidang permukiman 366 orang, bidang jalan dan jembatan 236 orang, bidang perumahan 242 orang, bidang pengembangan infrastruktur wilayah 247 orang, bidang manajemen konstruksi 601 orang, serta bidang manajemen 2.480 orang.
- Yang kedua adalah pelatihan bela negara untuk CPNS sebanyak dua *batch* pada 1.055 orang, yang dilaksanakan di Pusat, Pusdiklat Pasmus, Koppasus di Batujajar Bandung.
- Pelatihan dasar CPNS tahun 2022 sebanyak dua *batch* kepada 301 orang total, ada tujuh *batch*.
- Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II, sebanyak 40 orang.
- Kemudian pelatihan kerja sama dengan Purwadika untuk meningkatkan kemampuan digital yaitu dengan Purwadika Digital Technology School, kepada 70 orang ASN. Meliputi pelatihan *data science* 19 orang, *UI/UX design* 20 orang dan *web development* 31 orang.
- Kemudian karyasiswa magister super spesialis teknik sebanyak 417 orang, dengan prodi:

- Magister Super Spesialis Mitigasi Bencana Likuifaksi di UGM, 41 orang.
  - Magister Super Spesialis Mitigasi Bencana Rawa di UGM, 21 orang.
  - Magister Super Spesialis Geologi Struktur Bawah Tanah di UGM, 37 orang.
  - Magister Super Spesialis Air Tanah Dalam di UGM, 29 orang.
  - Magister Super Spesialis Rekayasa Jembatan Khusus di ITB, 16 orang.
  - Magister Super Spesialis Morfologis Sungai di ITB, 76 orang.
  - Magister Super Spesialis Desain Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan Bebas Banjir di ITB, 42 orang.
  - Magister Super Spesialis Operasi dan Instrumentasi Meteorologi Bendungan di Undip, 33 orang.
  - Magister Super Spesialis Retrofitting dan Instrumen Keamanan Bendungan di Undip, 37 orang.
  - Magister Preservasi Jalan pada Kondisi Geoteknik Tanah Sulit di ITS, 42 orang.
  - Serta Magister Super Spesialis Rekayasa dan Pengendalian Kehilangan Air Minum di ITS, sebanyak 43 orang.
- Kemudian Siswa Magister Super Spesialis Nonteknik, sebanyak 48 orang, dengan prodi:
    - Magister Super Spesialis Akuntansi Sektor Publik Universitas Brawijaya, sebanyak 20 orang.
    - Magister super Spesialis Akuntansi Sektor Publik di Universitas Hasanuddin, sebanyak 14 orang.
    - Magister Super Spesialis Hukum Kontrak Konstruksi di Unand, Universitas Andalas Padang, sebanyak 7 orang.
    - Magister Super Spesialis Teknik Informatika Keamanan *Cyber* di Binus, sebanyak 21 orang.
    - Magister Super Spesialis Ilmu Komunikasi *Public Relation* di UI, sebanyak 16 orang.
    - Karyasiswa S1 Teknik Sipil Uncen, sebanyak 9 orang dan karya siswa D4 STAN, sebanyak 27 orang.
  - Jumlah karyasiswa LPDP saat ini berjumlah 41 orang, yaitu tahun 2021 dan 2022. Karyasiswa LPDP dari tahun 2015 sampai 2022 total ada 87 orang, sedangkan rekrutmen karyasiswa LPDP di tahun 2022, Pak Menteri menegaskan minimal tahun ini bisa menugaskan, mengirimkan sebanyak 100 orang, per tahun, minimal. Untuk tahap pertama sudah dilakukan rekrutmen, sebanyak, lolos sebanyak 20 orang. Yang tahap kedua sedang tes sekarang, sebanyak 243 orang, semoga bisa memenuhi kuota 100 orang yang diamanatkan Pak Menteri.
  - Mahasiswa Politeknik PU sebanyak 642 orang meliputi:
    - Prodi D3 Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan sebanyak 218 orang.
    - D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air sebanyak 218 orang.
    - D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung sebanyak 206 orang.

Untuk Politeknik PU ini rencana tanggal 3 September akan wisuda perdana yang akan dilaksanakan di Semarang.

- Kerja sama pelatihan dengan Pemerintah Korea Selatan untuk peningkatan kompetensi sebanyak 25 ASN guna mendukung pengembangan IKN, serta kerja sama dengan Pemerintah Hongaria guna peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya, izinkan kami menampilkan alokasi anggaran menurut fungsi dan program unit Eselon I dalam RAPBN tahun 2023.

Berdasarkan Surat Menteri PUPR No. KU.01.01MN1455 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2023, pagu indikatif BPSDM tahun 2023 yang semula sebesar 376.488.585.000 berubah menjadi 399.738.585.000. ATA ini naik sebesar 23,25 miliar. Pagu tersebut terdiri dari pagu program dukungan manajemen sebesar 310.332.054.000 serta pagu program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 89.406.531.000.

Tambahan anggaran sebesar 23,25 miliar dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan direktif Bapak Menteri PUPR, terkait pengembangan kompetensi SDM sebagai pendukung terwujudnya reformasi birokrasi, antara lain:

- Yang pertama, pengembangan talenta, meliputi *assesment* dengan target 4.500 orang.
- Pemantauan kinerja, dengan target 21.560 orang dan,
- Pemetaan karier, dengan target 400 orang, target semula 210 orang menjadi 400 orang.
- Pelatihan, dengan target 5.570 orang, target semula adalah 5.250 orang, meliputi:
  - pelatihan bidang SDA dengan target 650 orang,
  - bidang permukiman dengan target 400 orang, target semula 300 orang,
  - bidang jalan dan jembatan dengan target 930 orang,
  - bidang perumahan dengan target 700 orang, target semula 640 orang,
  - bidang pengembangan infrastruktur wilayah 400 orang, target semula 340 orang,
  - bidang manajemen konstruksi 580 orang target semula 480 orang,
  - serta bidang manajemen dengan target 1.870 orang.
- Kemudian pendidikan Magister super spesialis S1 Uncen dan D4 STAN dengan target 550 orang.
- Pendidikan Vokasi dan Politeknik PUPR dengan target 732 orang.
- Serta pembekalan karyasiswa, monitoring, dan evaluasi program LPDP dan lainnya.

Rincian pagu per satuan kerja sebagai berikut:

- Sekretariat BPSDM, sebesar 101,5 M.
- Pusat Pengembangan Talenta, sebesar 8,9 miliar.
- Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Pemukiman, sebesar 33,9 miliar.
- Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, sebesar 25,9 miliar.
- Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, sebesar 27,48 miliar.
- Balai-balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah, sebanyak 9 balai sebesar 91,17 miliar.
- Balai penilaian Kompetensi, sebesar 16,6 miliar.
- Dan Politeknik PU, sebesar 94,25 miliar.

Kegiatan BPSDM tahun 2023 meliputi:

- pertama, pengembangan talenta, melakukan *assesment*, pemantauan kinerja dan pemetaan karir, *coaching*, mentoring dan konseling.
- Yang kedua, pengembangan kompetensi ASN, pendidikan magister super spesialis, kemudian S1 Uncen dan D4 STAN, serta pelatihan klasikal, serta non-klasikal, termasuk kurikulum dan modul dan pelatihan *mandatory* ASN kepemimpinan dan bela negara.
- Perkuatan lembaga institusi, dukungan manajemen satker, reformasi birokrasi, zona integratis, WBK dan WBWM, perencanaan dan penganggaran, monitoring evaluasi, serta kerja sama institusi dalam dan luar negeri.
- Yang terakhir adalah penyelenggaraan pendidikan Politeknik PU.

Demikian kami sampaikan, Pimpinan, mohon arahan dan koreksinya.

Kami tutup.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Lanjut, Kepala BPIW. Silakan.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir.  
RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,**

**Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan bagi kita semua,  
Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Pimpinan Komisi V DPR  
RI,**



**Bapak dan Ibu Anggota Komisi V DPR RI,  
Rekan-rekan Pejabat Tinggi Madya, Bapak Irjen, dan Bapak Kepala  
BPSDM,**

Izin menyampaikan seiring undangan yang disampaikan, saya akan menyampaikan terkait dengan progres Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Alokasi Anggaran BPIW Tahun Anggaran 2023.

Yang pertama adalah bahwa pada Tahun Anggaran 2022, pagu awal BPIW sebesar 212,83 miliar, saat ini menjadi 220,12 miliar, mengalami perubahan pagu dengan rincian sebagai berikut:

- adanya blokir untuk *automatic adjustment* sebesar 6,5 miliar dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya kondisi pandemi Covid-19.
- yang kedua, adanya luncuran dan percepatan PLN sebesar 7,2 miliar untuk kegiatan *integrated tourism development program*.
- Kemudian pergeseran intern BPIW yang tidak mengubah total pagu dalam rangka pemenuhan belanja pegawai, belanja barang operasional, belanja barang non-operasional dan belanja modal, dengan total sebesar Rp5,3 miliar.

Adapun realisasi pagu anggaran per 26 Agustus 2022 adalah sebesar Rp98,06 miliar atau 44,55% dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 44,57%.

Kemudian ada upaya-upaya yang kami lakukan untuk percepatan realisasi tahun anggaran tahun 2022, antara lain adalah:

- penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan revisi, perubahan petunjuk operasional kegiatan atau POK.
- Kemudian percepatan pelaksanaan survei, *focus group discussion* dan rapat koordinasi baik di level pusat dan daerah, dalam rangka penyiapan rencana pengembangan infrastruktur wilayah.
- kemudian melihat potensi anggaran tidak terserap untuk dialihkan kegiatan lain yang lebih produktif.
- Kemudian melakukan upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah luar negeri yaitu kegiatan *integrated tourism development project* atau ITDP dengan pinjaman Bank Dunia.
- kemudian melakukan percepatan pembahasan restrukturisasi kegiatan nasional *urban development project* bersama Bappenas dan Bank Dunia.

Hingga Tahun Anggaran 2021, BPIW telah menangani 208 kawasan dari 249 target kawasan, sesuai dengan rencana strategis. Pada Tahun Anggaran 2022, BPIW melakukan penanganan untuk 20 kawasan, dalam rangka penuntasan target renstra. Penanganan kawasan berupa penyusunan dokumen perencanaan dan pemrograman, keterpaduan infrastruktur PUPR berbasis wilayah pada kawasan prioritas.

Pada Tahun Anggaran 2022, BPIW telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis, antara lain: forum kemitraan lintas kementerian atau lembaga dalam bentuk rapat koordinasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah atau Rakorbangwil.

Rakorbangwil dilaksanakan untuk membahas program tahunan yang berasal dari memorandum program dan dapat pula membahas penambahan kegiatan dan kebijakan nasional baru dan/atau mendesak dan/atau direktif Menteri PUPR, serta menghasilkan kesepakatan program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya dari BPIW, unor-unor teknis terutama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya, kemudian kementerian dan lembaga lain, serta Bappeda Provinsi.

Kemudian penentuan kawasan prioritas dalam forum Rakorbangwil dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan kawasan prioritas, antara lain berpotensi memberikan *multiplier effect* bagi *hinterland* atau daerah sekitarnya, berdampak pada pemulihan dan atau peningkatan skala regional, dapat dijadikan *base* praktis untuk diaplikasi pada kawasan lain serta memiliki nilai strategis secara nasional bahkan internasional.

Berdasarkan hasil Rakorbangwil dan dilakukan penajaman pada forum konsultasi regional, terdapat 88 kawasan prioritas dengan program infrastruktur yang diakomodasi untuk program Tahun Anggaran 2023. Ada 35 kawasan di wilayah 1, meliputi Sumatera dan Kalimantan, 17 kawasan di wilayah 2, yaitu Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dan 36 kawasan di wilayah 3, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Saat ini sedang dilakukan proses penyiapan pelaksanaan Rakorbangwil di akhir tahun 2022, untuk penentuan kawasan prioritas Tahun Anggaran 2024. BPIW telah memulai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Kemudian juga pembahasan di internal Kementerian PUPR, serta penajaman di internal BPIW.

Pada tahun 2022, BPIW juga sedang menyusun dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah atau BPIW berbasis provinsi, yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan infrastruktur PUPR 10 tahun ke depan. RPIW merupakan salah satu upaya menciptakan standar substansi dan kualitas agar setiap produk rencana RPIW, agar setiap produk rencana BPIW mempunyai muatan yang standar dan berkualitas. RPIW provinsi ditargetkan selesai pada tahun anggaran 2022, dengan rata-rata progres penyusunan berkisar di 40%, sehingga perlu dilakukan percepatan.

BPIW pada Tahun Anggaran 2022 juga melaksanakan amanat Menteri PUPR, tugas khusus dari Bapak Menteri PUPR, terkait dengan integrasi penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, ya. Alur penanganan dibagi menjadi tiga tahap, mulai dari tahap penajaman lokus, tahap survei kolaborasi, dan tahap penanganan. Data yang digunakan dalam proses penajaman lokus

adalah data PK21 BKKBN sesuai arahan dari Sekretariat TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, karena memuat informasi terkait dengan kondisi kelayakan akses air minum, sanitasi, dan rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2022, telah ditetapkan 212 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting, di mana 117 kabupaten/kota di dalamnya merupakan dapil Komisi V.

Dari hasil survei kolaborasi tahap 2 akan dilakukan penanganan integrasi cipta karya dan perumahan pada 17 lokasi di 8 provinsi. Pada lokasi fokus integrasi, Kementerian PUPR diharapkan dilakukan konferensi program dengan kementerian/lembaga lainnya.

Berdasarkan Surat Menteri PUPR KU0101MN1455 tentang Penyesuaian pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2023, BPIW diamanahi anggaran sebesar Rp140,76 miliar. Pagu tersebut berkurang dari pagu indikatif yang sebelumnya sebesar Rp163,38 miliar. Perubahan pagu indikatif dan pagu anggaran terjadi karena adanya penyesuaian pagu *loan* NUDP yang semula sebesar 29,18 miliar menjadi Rp6,56 miliar.

Adapun rencana kegiatan BPIW tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pertama adalah rencana pengembangan infrastruktur untuk kawasan prioritas Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, termasuk kegiatan ITDP NUDP, sebesar Rp33,26 miliar.
- Kemudian pelaksanaan sinkronisasi program tahunan pada 8 wilayah di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, sebagai bahan Rakorbangwil dan konsultasi regional, sebesar Rp11,5 miliar.
- Kemudian pemantauan evaluasi di seluruh wilayah Indonesia, sebesar Rp17,2 miliar.
- kemudian penyusunan telaahan strategis kewilayahan sebagai bahan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan, sebesar Rp4 miliar.
- kemudian pelaksanaan kepatuhan internal unit organisasi, sebesar Rp1,65 miliar.
- serta pelaksanaan dukungan manajemen terkait kesekretariatan dan tata usaha yang dilakukan BPIW. Termasuk pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional, sebesar Rp73,15 miliar.

Demikian Bapak Ketua dan Bapak/Ibu semua, yang kami sampaikan.

Mohon masukkan dan saran-saran berikutnya, terima kasih.

Akhir kata,

*Wabillahitaufiq walhidayah,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Demikianlah penjelasan yang telah disampaikan oleh para Pejabat Eselon I Kementerian PUPR.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaannya. Kami, di tempat kami sudah ada nama-nama yang akan menyampaikan. Kami mulai yang pertama, Saudara Soehartono.

Silakan.

**F- P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

*Makasih, Ketua.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Para mitra Komisi V, Inspektorat Jenderal PUPR, SDM,  
dan BPIW,  
beserta rombongannya,**

Saya tadi mendengar paparan Inspektorat dan SDM, itu penyerapan anggaran 22 masih jauh, masih seputaran 55%, tolong *digenjot* karena ini tinggal 4 bulan ya, jadi tinggal September, Oktober, November, Desember. Perlu percepatan, sehingga untuk ke depan, yang 23, tidak ada permasalahan lagi, termasuk BPIW, *gitu*. Kelihatannya seperti ajuan para Bapak-Bapak ini yang 23 ini juga sifatnya rutin saja, *enggak* ada proyek fisik, *gitu* ya, jadi *sing kasat moto* itu *enggak* ada. Saya lihat dari ketiga bidang ini, Inspektorat, SDM, dan BPIW, terutama BPIW *gitu* ya, yang 22 masih ada ya fisiknya itu, tapi yang 23 *enggak* ada sama sekali.

Khusus untuk BPIW, Pak, sebelum BPIW itu berdiri atau disahkan sebagai badan, dulu kita itu sudah membahas dengan badan yang terdahulu tentang Selingkar Wilis. Mengapa Selingkar Wilis itu diusulkan *gitu* ya? waktu itu kepala badannya, almarhum Bapak Hermanto Dardak, dan kebetulan beliau dilahirkan di Trenggalek, *gitu* ya, Lereng Wilis. Jadi Gunung Wilis itu dikitari oleh 6 kabupaten ya, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk. Semua kabupaten itu di wilayah Lingkar Wilis itu termasuk kantongnya kemiskinan atau istilahnya desanya tertinggal semua. Karena apa? Karena jalan atau akses yang membelah gunung itu, tidak ada. Beda dengan Gunung Kelud dan Tengger.

Tetapi saya melihat, setelah BPIW ini apa, eksis, justru yang dibiayai Tengger, justru yang dibiayai Gunung Kelud, yang mereka sudah ter-*connect* dan di situ *udah, udah*, termasuk maju, bukan daerah tertinggal lagi. Ini apa ukurannya, mengapa itu Selingkar Wilis ditinggalkan, kemudian pindah ke Tengger, Tengger apa ya, yang wisatanya sudah jadi itu, ya.

Kemudian Selingkar Wilis itu sebenarnya koordinasinya sudah mantap saat wakil gubernur sekarang ini, masih jadi bupati. Itu ada koordinasi dan Komisi V diundang. Dan saat itulah seperti deklarasi BPIW. BPIW ini yang paling apa harus dikerjakan lebih dulu itu adalah jalan. Kalau yang lalu itu belum *connect*, saat ini, Pak, sudah *connect*, karena di Madiun yang lalu itu ada seputar 5 kilo belum diaspal, sekarang ini sudah dikerjakan oleh kabupaten.

Kemudian di Selingkar Wilis itu ada Bandara Kediri, Pak, Bandara Kediri itu dengan Selingkar Wilis ya paling-paling sekitar 2 kilo saja. Jadi akses ke situ itu sudah dekat, dekat sekali, *mepet gitu ya, gitu*. Kemudian Selingkar Wilis andalannya adalah agrobisnis, itu luar biasa, cengkehnya juga apa, ekspor.

Kemudian, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, apakah BPIW itu tidak ada anggaran fisik? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada anggaran fisik, apakah BPIW mengadakan koordinasi dengan bupati yang wilayahnya kena Selingkar Wilis? Saya lihat ini anggaran juga anggaran rutin saja, biaya ini, biaya ini, yang fisik *enggak* ada. Artinya apa? Eksistensi BPIW itu *lho*, nilai plus dan anunya itu untuk daerah itu apa? Sampai sekarang *enggak* ada sama sekali, *gitu*. Justru tadi yang ingin saya tanyakan, justru Tengger yang sudah bisa mandiri, dibiayai. Ini maunya *gimana gitu ya?*

Oleh karena itu BPIW saya minta dengan sangat, agar koordinasi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang beliaunya itu ikut membidani Selingkar Wilis. Jadi Selingkar Wilis itu memang kehendak para bupati situ untuk mengangkat agar desa-desa mereka itu tidak tertinggal lagi.

Jadi itu Pak yang penting, jadi namanya saja Badan Pengembangan Infrastruktur *gitu lho*. Karena badan ini pengembangan infrastruktur, dengan siapa mengembangkan infrastruktur itu? Itu pertanyaan, betul, dengan siapa itu maksudnya, misalnya kalau PUPR itu membiayai fisik, berarti bersama dengan PUPR. Tetapi kalau kosong saja, *enggak* ada biaya untuk fisik, ya menurut saya *enggak* efisien.

Saya kira itu dari saya, Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik, yang berikut, Saudara Muhammad Aras.

Silakan.

**F- PPP (Dr. H. MUH. ARAS., S.Pd., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
**Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua,**

**Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Irjen, Kepala BPSDM, Kepala BPIW,  
dan seluruh jajaran yang sama saya hormati,**

Pertama-tama, tentu mengapresiasi capaian yang telah dicapai sampai bulan Agustus. Namun capaiannya kelihatannya masih belum maksimal, Pak, jadi mohon *digenjot* dan tentu ada strategi-strategi khusus untuk mencapai angka maksimal di akhir tahun. Dan ketiga badan ini kan ada Irjen, belanjanya ini kan belanja rutin saja, Pak. Jadi saya pikir, ini tidak ada kesulitan untuk bisa menyelesaikan seluruh rencana dan agenda sampai akhir tahun.

Yang kedua, terkait dengan di Irjen, ini sampai hari ini belum bisa di-*clear*-kan hampir semua permasalahan-permasalahan di internal. Oleh karenanya, mohon ada strategi-strategi khusus agar seluruh masalah juga bisa terselesaikan dan paling minimal ada langkah-langkah untuk antisipatif. Karena ini kan pekerjaan yang berulang, Pak. Jadi berharap bahwa kelemahan-kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, kita harapkan di tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi. Sehingga betul-betul Kementerian PUPR yang di bawah naungan Bapak betul-betul bersih dari permasalahan internal yang bisa mengakibatkan juga terlambatnya pembangunan secara nasional.

Yang kedua, untuk BPIW, ini kembali ke dapil, bahwa itu pengembangan infrastruktur jalan dari Makassar ke Maros itu sangat mendesak untuk bisa dilakukan penataan ulang, sehingga kemacetan yang setiap hari terjadi di situ sudah bisa terhindarkan. Konsep ke depan seperti apa, sehingga BPIW punya peran untuk memberikan masukan kepada Bina Marga untuk ini segera diselesaikan.

Yang kedua adalah, ini kita dengar bahwa pembangunan IKN sudah mulai dilaksanakan. Dan tentu peran BPIW sangat sentral di sana. Bagaimana konsep yang telah dirumuskan oleh BPIW untuk merencanakan pembangunan di IKN yang terkait dengan infrastruktur yang melibatkan Kota Balikpapan dan Samarinda? Mohon penjelasan singkatnya, Pak, supaya kami bisa mendapatkan gambaran, gambaran, seperti apa pembangunan IKN yang tentu yang kita harapkan.

Kemudian BPSDM, ini suatu hal yang paling penting dalam hal penyiapan SDM di lingkungan PUPR, oleh karenanya tentu berharap bahwa apa yang dilakukan betul-betul secara langsung bisa memberikan manfaat kepada PUPR dan pembangunan infrastruktur di negeri ini.

Yang kedua, tentu kita lihat bahwa ada keterlibatan di beberapa daerah terkait dengan kerja sama dengan institusi perguruan tinggi. Mohon dilakukan pemerataan, paling minimal dari Sabang sampai Merauke, perguruan-perguruan tinggi terkait, yang dengan kegiatan-kegiatan Bapak supaya

dikoordinasikan, dikerjasamakan. Sehingga pemerataan SDM dari Sabang sampai Merauke betul-betul bisa kita hasilkan.

Dan yang terakhir, tentu kami berharap bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bisa dikomunikasikan dengan teman-teman Komisi V, sehingga fungsi pengawasan kami di daerah, betul-betul bisa mendapatkan gambaran yang pasti dan tidak asal jalan saja, dan tidak melibatkan teman-teman yang ada di Komisi V.

Barangkali itu Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Selanjutnya Ibu Sarce, kami persilakan.

**F- PDIP (SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Salam sejahtera buat kita semua,  
Shalom,**

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan beserta rekan-rekan,  
Yang saya hormati pula seluruh mitra kerja kami, Irjen, BPSDM, dengan  
BPIW yang saya hormati,  
beserta dengan jajarannya,**

Jadi saya tidak mengulang lagi yang sudah dikatakan teman-teman. Saya memberi apresiasi kepada tiga rekan kerja yang sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Dan di sini saya menuju ke BPIW, yaitu ada pertanyaan pada *slide* nomor 32, yang terkait kawasan pertanian Luwu. Yang saya mau tanyakan ini, apakah yang dimaksud di sini Luwu secara umum atau khusus? Luwu, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan?

Di sini juga saya sampaikan ke BPIW, bahwa dalam mendukung program penanganan miskin yang sudah berjalan seperti pembangunan rumah yang tidak layak huni, sanitasi air bersih, PAMSIMAS, PISEW, KOTAKU, yang sudah berdampak baik masyarakat Indonesia secara umum dan khusus, sudah dirasakan masyarakat di dapil saya. Tentu besar harapan dan program ini akan terus berlanjut. Kami dari dapil Sulawesi Selatan, terutama Sulawesi Selatan yang dapil saya itu, mengucapkan terima kasih banyak, karena sudah terealisasi semua.

Dan pada tahun 2021, banyak terjadi banjir yang berdampak pada persawahan dan pemukiman di Kabupaten Luwu, Pak, itu dapil saya. Terutama Kecamatan Lamasi, Desa To'pongo, yang saat ini belum pernah ada tindaklanjut. Pada kesempatan ini, mungkin perlu disinkronisasikan dengan Direktorat DSA, supaya bagaimana, karena masyarakat disana sangat merasakan, Pak, sampai ke daerah Pompengan di sana. Karena kemarin, saya baru pulang dari dapil, betul-betul masyarakat sangat mengeluhkan banjir.

Dan yang berikutnya, dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, Toraja, salah satu destinasi wisata Indonesia, maka perlu diperhatikan infrastruktur, Pak, jalan khususnya akses ke tempat wisata yang sampai saat ini masih mengalami kerusakan. Sehingga kita perlu melakukan penanganan atau prioritas untuk Tahun Anggaran 2023. Sehingga dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, sangat perlu sinergitas antara Komisi V dan Kementerian PUPR sebagai mitra kerja pemerintah daerah, semoga bisa berjalan dengan baik.

Dan saya juga di sini, Pak, menyampaikan bahwa akses jalan banyak rusak, Pak, di dapil, banyak terjadi kecelakaan. Jadi bagaimana, apakah di sana tidak ada anggaran untuk pemeliharaan? Sementara jalan-jalan yang sudah diperbaiki, banyak menelan anggaran, *kok* tidak pernah diperhatikan, banyak yang rusak, Pak.

Jadi mungkin ini saja yang saya harapkan kepada Kementerian PUPR, supaya disampaikan. Semoga ke depan, masyarakat bisa menikmati betul-betul apa yang kita sudah laksanakan, terima kasih banyak.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Selamat datang, Pak Ridwan.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Siap, *makasih*, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, lanjut.

Saudara Tamanuri, kami persilakan.

**F- P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pak Ketua serta Wakil Pimpinan,**



**Yang saya hormati Pak Irjen, Pak Dirjen Sumber Daya Manusia, Bapak BPIW, serta hadirin yang berbahagia,**

Kalau kita lihat fungsi dan tugas daripada masing-masing ini, memang sangat luas. Tapi dana yang diterima, yang dialokasikan kepada masing-masing lembaga, cukup memprihatinkan. Apakah ini ada merupakan satu sebab? Makanya di dalam anggaran yang akan datang ini tidak kelihatan pembangunan secara struktur, infra infrastruktur itu, hanya pendidikan-pendidikan saja.

Di Lampung ada itu program pembangunan SPAM yang diambilkan dari airnya dari apa itu, air, air mengalir, itu Bendungan Argaguruh, itu Bendungan Way Sekampung. Dalam pelaksanaan pekerjaannya awalnya baik, lancar. Tetapi ada di antaranya yang kerjanya menimbulkan *ruwet* kepada rumah-rumah orang, karena ada yang kedalaman 4 sampai 5 meter penanaman ini, apa, kabel, eh selang-selang itu. *Nah* ini orang merasa tidak terima ini, pekerjaan seperti ini, karena membuat orang tidak bisa keluar masuk berkendaraan. Selain daripada itu, yang mengarah lagi ke lebih jauh lagi, banyak apanya, apa itu, pipa-pipanya belum, masih banyak yang belum ditanam. *Nah*, oleh karena itu, oleh karena itu, ini perlu mendapatkan perhatian bagi Bapak-Bapak sekalian supaya pekerjaan ini jangan terlalu lama, soalnya pekerjaan ini adalah pekerjaan besar. Yang ditanam pipa-pipa itu setidaknya-garinya garis tengahnya  $\frac{1}{2}$  meter, jadi banyak menggunakan alat-alat berat. Harapan saya, supaya ini mendapat perhatian.

Kemudian selain daripada itu, pekerjaan, mohon maaf, dirjen yang lalu, mengenai terminal plus satu Rajabasa. Dari dulu saya sudah katakan sama, saya laporkan sama beliau. *Kok* itu, perbaikan daripada aspal-aspal tempat keluar masuk, jalan-jalan ataupun yang ada di lingkaran terminal, ditumpuk batu tapi tidak dikasih aspal. Apakah ada model baru? *Eenggak* ada jawaban. Setiap saya katakan seperti itu, tidak ada jawaban, katanya nanti lihat. *Nah*, sekarang sudah sebesar-besar kerbau itu lobang-lobang, bagaimana mobil-mobil mau masuk di dalam terminal? Apa akhirnya? Akhirnya timbullah terminal bayangan, yang juga tidak bisa ditertibkan oleh kawan-kawan kita di pihak kepolisian. Yang terminal di dalam induknya, kosong, yang terminal bayangan, berpuluh-puluh mobil tiap hari di situ itu. *Nah*, ini, ini kan *eenggak* elok dilihat mata telanjang.

Kemudian, masuk di mana ya kalau lampu jalan ya, ada lampu jalan *eenggak?* ada kan? Ya kalau disini ada lampu jalan *eenggak* ada, *eenggak* ada, Pak Alawi? *Eenggak* ada ya? Oh ya *udah*. Baik, kalau langsung, *gitu*.

Kemudian saya mendengar dulu, kami ini sangat banyak objek-objek wisata, di Teluk Betung itu sampai ke Pahawang itu, tidak kurang 4-5 objek wisata. Baik objek wisata untuk apa, apa itu, motor yang cepat itu, atau objek-objek wisata dengan kondisi air yang sangat-sangat kalem airnya. Bisa kita melihat ke bawah, kemudian pasir di bawah itu bagus, sehingga orang, jam 4 subuh orang sudah banyak yang ke situ. Tetapi ini untuk pengembangannya

ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Menteri apa Pariwisata Kreatif, waktu beliau meninjau Pahawang, ini akan jadi objek wisata internasional katanya, melihat potensi yang ada. Tetapi untuk masuk ke situ, jalan itu tidak memungkinkan. Namanya kalau jalur wisata itu tetap bus harus masuk, ini kan jalan hanya 4 meter. *Nah*, kalau, kalau mobil itu keluar-masuk, tentu yang satu harus berhenti. *Nah*, oleh karena itu saya pernah menanyakan sama Pak Menteri, bahwa ini katanya sudah ada perencanaan di Teluk Betung sepanjang 8 kilo ke arah kompleks marinir yang ada di apa itu. *Nah* jadi ini juga perlu menjadikan perhatian, harapan kita adalah semuanya bisa bangkit, sehingga ekonomi kita juga bangkit. Bukan hanya kita *enggak* bisa tidur *mikiran* BBM, tapi ini, inilah bisa mendorong percepatan ekonomi itu karena banyaknya nanti orang-orang.

Sekarang ini mohon maaf, Pak Eddy Santana, Bapak-Bapak itu keluarganya setiap hari Jumat sudah di Lampung, sudah di Lampung, Minggu sore. Jadi kalau kita punya duit untuk bikin *rate* apa, yang kamar-kamar apa itu, ya *homestay-homestay*, ya luar biasa.

Saya rasa demikian, *makasih*.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Tamanuri.

Lanjut, Pak Willem Wandik. Bersiap-siap, Pak Ishak Mekki. Silakan Pak Willem.

#### **F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Baik.

**Pak Ketua,  
dan juga Bapak-Ibu Anggota Komisi V, dan mitra,  
serta seluruh jajarannya,**

Dari kami pertama untuk BPIW, bahwa kami melihat memang BPIW memiliki fungsi yang banyak dan strategis, mulai dari melakukan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan memastikan keterpanduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PU PERA. Oleh karena itu pada RDP ini, kami minta agar BPIW meningkatkan perannya dalam perencanaan pembangunan di Papua oleh Kementerian PU PERA. Karena kami mengamati pembangunan yang dilakukan di Papua oleh PU PERA, desainnya belum terintegrasi dengan baik, misalnya jalan trans Papua telah dibangun, tapi kawasan penunjangnya tidak dibangun. Jika memang BPIW sudah memiliki desain pembangunan infrastruktur di Papua, tolong agar koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten di Papua, supaya saling melengkapi, demi terwujudnya pengembangan wilayah di Papua yang baik.

Yang kedua, kepada BPSDM, kami minta agar perlu diprioritaskan bagi peningkatan SDM Papua dalam pembangunan infrastruktur. Afirmasi dari Kepala BPSDM memang kami sangat membutuhkan, termasuk untuk masuk ke politeknik yang ada dalam pengelolaan BPSDM Kementerian PU PERA.

Dan yang ketiga kepada Irjen PU PERA, kami minta agar peran Bapak dan jajarannya dalam melakukan pengawasan internal khususnya pelaksanaan kegiatan proyek PU PERA di wilayah Papua, ditingkatkan. Dan mohon diberikan laporan secara detail kepada kami supaya kami bisa membandingkan dengan kondisi *real*-nya di lapangan. Jangan sampai hanya dengan alasan keamanan, lalu proyek yang dikerjakan tidak diselesaikan secara tuntas, padahal masyarakat di tanah Papua memang sangat membutuhkan hadirnya pembangunan infrastruktur.

Sekian, Pak Ketua, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, lanjut, Pak Ishak Mekki. Bersiap-siap, Pak Bakri.

#### **F- P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan beserta anggota,  
Juga yang saya hormati Inspektorat Jenderal, dan juga Badan BPIW,  
BPSDM,  
beserta jajarannya,**

Saya langsung saja ke persoalan, terkhusus kepada Inspektorat Jenderal. Yang pertama, saya ingin menanyakan masalah jalan tol Pematang Panggang, Pematang Panggang dengan Terbanggi Besar dan juga Pematang Panggang - Kayu Agung. Nah ini baru diresmikan, baru diresmikan. Sekarang sudah rehab total, rehab total, dan baru direhab, sudah rusak lagi, sudah rusak lagi. Nah sekarang direhab 112 km di Terbanggi Besar sampai Pematang Panggang dan 77 km dari Pematang Panggang ke Kayu Agung. Ini rusak besar. Sedangkan jembatannya juga jembatan Sungai Sodong *offride*-nya turun dan sekarang dipasang kiri kanan bahu jalannya *pile slab* ratusan meter. *Nah* apakah perencanaan dari awal itu tidak terpikirkan, kalau mau dipasang *pile slab* atau konstruksinya bagaimana, sehingga terjadinya seperti ini, mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas, dan ini merugikan negara.

Menurut informasi, konsultan pengawas daripada konstruksi jalan tol ini dibiayai oleh APB, eh dibiayai oleh BUMN, sedangkan melaksanakan jalan tol ini sendiri, BUMN. Jadi dana pengawasan konsultan ini, pengawas konsultan, pengawas ini dari BUMN, yang mengerjakannya juga BUMN, jadi ini *enggak* pas. *Nah*, sebegini dana pengawasan ini dari APBN bukan dari BUMN,

sehingga dia bisa mengawasi dengan sepenuh hati, karena sekarang rusak terus-menerus.

Kedua yang saya tanyakan kepada BPSDM, pertama, pensiunan kepala-kepala balai, kepala-kepala balai, seperti di Sumatera Selatan saya lihat apakah Balai Perumahan, Bina Marga. *Nah*, setelah pensiun itu dikaryakan difungsionalkan, apa kriterianya misalkan bisa dikaryakan? Apa ada prestasinya dan sebagainya. *Nah* ini kita mohon penjelasan, kalau memang prestasinya bagus ya kita *enggak* ada masalah. Tapi kalau prestasi kerjanya selama ini *enggak* bagus, *kok* ini bisa dikaryakan? Padahal yang antrian banyak ini yang ingin masuk PU ini.

Kedua, yang mengawasi BPPS perumahan dan seperti proyek-proyek prorakyat ini. Ini juga yang daftar yang banyak diterima oleh PU, karena panitianya oleh PU, oleh balai, pensiunan-pensiunan PU juga yang sudah tua-tua. Mau ke sana ke mari jaraknya jauh, ini rasanya tidak memungkinkan. Jadi ini ada unsur KKN-nya, *nah* tolong ditinjau ini.

Ketiga, Inspektorat ini banyak sekali proyek-proyek fisik di Kementerian PUPR ini. *Nah*, apakah ada peninjauan setiap provinsi itu terhadap selesainya proyek-proyek yang dikerjakan tahun ini? Apakah tidak berdasarkan laporan atau pengaduan? Karena ini terkesan kalau rusak cepat ataupun tidak selesai, ini kan tanggung jawab daripada PU. Padahal belum tentu, bisa juga, ya, kontraktornya, kontraktornya. *Nah*, ini tolong bagaimana supaya ke depan, hasil-hasil pembangunan ini ya lebih punya kualitas. Karena terus-terang saja, khusus Cipta Karya, ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang asal-asalan, volume banyak kurang dan sebagainya, akhir tahun banyak temuan-temuan. *Nah*, ini tolong di, dievaluasi.

Untuk BPIW, di Sumatera Selatan khusus di dapil saya, itu ada danau Teloko. Danau Teloko itu luasnya 840 Ha dan itu tidak pernah dijamah. *Nah*, ini milik negara, milik negara. Karena dari zaman dulu dari zaman sebelum Belanda mungkin belum pernah dijamah sampai sekarang. Padahal ini potensi dan ada keterkaitan dengan orang petani sawah dan sebagainya di sekelilingnya. Dan ini tidak pernah dinormalisasi, tidak pernah diperhatikan. Baru kemarin kita usulkan, baru ditinjau dan direncanakan. *Nah*, kalau ini ditata, dibuat waduk, ini kan kalau gali tanah, lahannya sudah berapa. Ini lahannya sudah ada, sudah digali, *kok* tidak dimanfaatkan. *Nah*, karena ini juga sedimentasinya luar biasa, harapan saya, ini juga digali atau dinormalisasi. Gambut atau kiri kanan pinggir danau ini dinaikkan ke atas, sehingga nanti dibuat pintu air dan bisa juga waktu kemarau dialirkan dan waktu hujan menampung air. *Nah*, ini harapan kita khusus untuk danau Teloko ini, karena ini aset.

Ini saja mungkin, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Saya lanjut Pak Eddy Santana, karena mau ada keperluan. Silakan Pak Eddy.

**F- P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,  
Para Pejabat Eselon I beserta jajaran dari Irjen, BPIW, dan BPSDM,**

Saya langsung saja, Pak, pertama tadi tapi sudah disebutkan oleh Pak Ishak Mekki. Inspektorat Jenderal ini kan pengawasan internal lah, lebih banyak internal. Tapi tidak mungkin juga dengan kondisi yang ada, anggaran yang terbatas, Inspektorat Jenderal ini bisa mengawasi keseluruhan *gitu* ya, paling-paling *sampling* saja. Kami ketika di daerah juga misalkan di kota/kabupaten atau provinsi ada kan Inspektorat kota/kabupaten dan provinsi itu. Begitu juga *enggak* bisa semua program semua proyek itu bisa diawasi juga secara internal oleh Inspektorat masing-masing, itu. *Nah*, ini juga demikian terlalu luas, misalnya kalau di PU ini, PUPR ini ada 5.000 paket setahun, nah kapan bisa mengawasi secara langsung, *gitu* kan? *Nah*, ini saya kira harus ada suatu sistem. Tentu tadi disampaikan juga ada konsultan-konsultan supervisi *gitu* ya.

Nah saya juga melihat baru kemarin itu, kalau misalnya di jalan tol ya, saya ulangi lagi, jalan tol, yang menunjuk juga, eh misalnya yang mengerjakan penugasan, Hutama Karya atau apa lah, BUMN. Nanti mereka yang mengadakan konsultan supervisi, ini jeruk makan jeruk, ini. Harusnya memang dari, dari PUPR-nya mengawasi lebih ketat. Jadi ada sistem pengawasan yang baik lah antara BUMN yang mengerjakan atau swasta juga, ada swasta murni juga yang mengerjakan jalan tol, diawasi oleh konsultan supervisi yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR, *gitu*, dari dana APBN, itu lebih pas harusnya.

*Nah*, kemudian untuk BPSDM ya, dulu kita mengenal juga di PU ini banyak kerja sama, Pak, dengan luar, *gitu* ya. Antara lain kalau urusan sumber daya air dengan, ini pernah saya sampaikan juga, dengan Delft ya, Belanda itu, IHE, nah itu munculah program *BIPOWRD* (*Bandung International Program for Water Resources Development*), nah ini saya melihat *enggak* ada lagi seperti itu. Tapi lebih ke S2, super spesialis, atau S3, itu dikirim ke perguruan tinggi kita sendiri. Memang sekarang sudah makin maju, *gitu*, perguruan tinggi kita tapi ada baiknya kalau ada juga yang dikirim ke luar atau kerja sama lagi. Jadi lebih cepat, Pak, pengembangan SDM-nya di PU sendiri. Terutama yang muda-muda, baru masuk *gitu* kan, baru masuk, *nah*, disekolahkan lagi, kerja sama dengan luar, bisa saja dengan siapa saja, sama Korea, China atau Belanda juga, itu. *Nah*, ini saya kira lebih baik lah kualitasnya nanti SDM di PUPR, di samping yang program reguler yang dipaparkan tadi, *gitu*.

*Nah*, kemudian untuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pak, saya tidak melihat detailnya sedikit saja, Pak, *gitu*. Misalnya tadi dipaparkan jadi masih, wah masih umum sekali. Mungkin saya minta ini, Pak, secara detail apa yang dilakukan di dapil kami *gitu*, katakanlah pengembangan Sumatera bagian selatan, *nah*, itu, apa yang dilakukan di situ? Apa produknya, dengan anggaran yang sudah dibelanjakan itu, *gitu*. Saya kira masing-masing kami dapil perlu itu, oh ini kalau jalan kita ke depannya seperti ini, *gitu* kan, jembatan segala macam.

*Nah*, saya ingin melihat apakah masih ada terbuka perencanaan ke depan ini, jembatan Selat Sunda misalnya, kemudian jembatan Sumatera-Bangka Belitung. Nah ini ini penting sekali untuk pengembangan wilayah kami *gitu* ya, di samping juga kita ada Sumatera ini ada jalan lintas timur, lintas barat dan lintas tengah, mau diapakan itu, setelah adanya nanti jalan tol dari Lampung, Palembang, Jambi dan ke utara, juga dari Lampung, Palembang ke Bengkulu, *gitu* ya lewat Lubuklinggau, bagaimana ini pengembangannya?

*Nah*, kemudian yang kedua, kita tidak melihat sekarang ini kawasan ini, Pak, metropolitan *gitu* kawasan kota. *Nah*, ini ada baiknya BPIW juga menangani ini, *gitu*, siapa yang melakukan ini? Mulai dari, nah ini tata ruangnya sudah tidak di PU lagi kan, sudah di BPN *gitu* ya, BPN Tata Ruang. Apakah ada kerja sama itu? Jadi RUTR wilayah, nasional, provinsi, kabupaten/kota, *gitu*, kan, detailnya. *Nah*, saya ingin ada detailnya itu di kota, *gitu* kan. Sehingga ada perencanaan yang baik, kota-kota kita tidak, jalannya jadi *nyimpang*, *gitu*, perencanaannya.

Kita harus perhatikan juga, Pak, bahwa zaman Belanda dulu mereka punya planolog yang baik, sehingga kota-kota kita ini dulu di zaman Belanda, sebetulnya bagus, Pak. Kalau Jakarta, Menteng, *gitu* ya, kota, saluran yang besar-besar, *gitu*. Kalau di tempat-tempat lain juga seperti itu, ya di Palembang juga, ketika itu sungai itu jadi ini, jadi muka, muka kota, *gitu*. Tapi setelah pasca kita merdeka, setelah merdeka, justru kita semrawut, Pak. Kota itu berjalan sendiri, akhirnya sungai-sungai jadi belakang, *gitu*, ya, jadi tempat pembuangan, sampah pembuangan kotoran, sebagainya, termasuk tempat kami, *gitu* ya. *Nah*, sekarang kita mau buka lagi, mau beresin lagi, itu sulitnya luar biasa itu, saya pernah melakukan 100-200 meter saja sudah sulit, Pak, karena sudah kumuh duluan di sini, di pinggiran sungai.

*Nah*, apakah kita akan biarkan seperti ini, pengembangan kota ke depan, ya terutama kota-kota yang ada sungai, *gitu* ya. Saya kira harus ditangani cepat sehingga kota-kota kita akan semakin baik dan tidak kalah dengan luar. Ingat, Pak, kalau kota sungai itu adalah kota yang sukses, kalau di luar itu, mana ada yang jelek? Bagus semua. Nah termasuk *benchmark* kita, taruhlah kalau kami, Bangkok, *gitu* ya, Bangkok itu ya luar biasa, *enggak* ada yang kumuh pinggir sungai.

*Nah*, kemudian bagaimana kota itu, penyediaan SPAM-nya, apakah bisa ditangani BPIW ke depannya *gimana*, IPAL-nya juga. Nah saya ingin juga, ingin tahu, berapa persen kita IPAL kita ini, di Indonesia ini, kota-kota di

Indonesia ini? *Nah*, kami pernah belajar juga waktu itu berapa hari ya di Bangkok, 80% kota itu sudah diolah, limbahnya, *gitu* ya. *Nah*, kita mana kota yang 80%, apakah sudah ada? Saya kira belum ada ini. Jadi ini menjadi PR kita ke depan, jadi air bersihnya bagus, pengolahan limbahnya baik, *gitu* kan, kotanya teratur, terencana dengan baik.

Saya kira ini, Pimpinan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Eddy Santana.

Lanjut Pak Bakri, bersiap-siap Pak Muhammad Fauzi.

**F- PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Baik, terima kasih.

**Pak Ketua yang saya hormati,  
kepada teman-teman Anggota Komisi V yang saya banggakan,  
Dari BPIW - Pak Arif, terus Pak Irjen, dan BPSDM - Pak Khalawi, yang kami hormati,**

Terima kasih.

Saya pertama bicara ke Pak Inspektorat Jenderal ini, terkait dengan pengawasan pengadaan barang dan jasa. Di Jambi itu sudah dua tahun berturut-turut, tahun 2021-2022 dan kepala balainya juga tetap itu, terjadi satu kegiatan yang cukup aneh, yaitu adanya tender proyek yang dimenangkan adalah rekanan yang sudah *blacklist*. *Nah*, jadi kepala balainya ini melakukan kegiatan yang hampir sama 2021-2022. Dulu itu adalah kegiatan proyek rehabilitasi dan pembangunan sekolah, si, si kegiatannya di Balai Cipta Karya. Ada berapa bulan, sudah, mungkin ya kemungkinan ambil uang muka, kegiatan apa-apa, tau-taunya muncul pengumuman bahwa itu *blacklist*. *Nah*, saya *enggak* tahu ini apa yang dikerjakan kepala balai ini, balai BP2JK-nya.

*Nah*, terakhir kemarin, itu ada kegiatan di Balai SDA, juga begitu, dimenangkan, lama-lama eh, *blacklist*, tender ulang lagi. Ini tahunnya berturut-turut, 2021-2022 dan kepala nalainya itu-itu juga, pokjanya itu-itu juga. *Nah*, saya minta, coba dikirimkan betul tim lah, apakah memang ada faktor x atau memang faktor manusianya atau *gimana*? *Nah*, karena saya tahu bahwa di situ pertama, Pak Irjen, pokjanya itu dari dulu itu *aja*, Pak, itu. Dan isu bicara di warung kopi itu, itu saja, *enggak* tahu *kok* kuat sekali ini pokja ini. Ya paling tidak untuk mengurangi bicara di warung kopi itu *mbok* ya diganti lah, kalau *toh*, memang *enggak* rugi juga kan, ya paling tidak penyegaran lah. Saya pernah bilang sama Pak Menteri, kalau bisa pokja-pokja itu paling lama dua tahun lah, karena ini rawan, Pak, rawan sekali terjadi sesuatu hal yang tidak-tidak.

*Nah*, yang saya soroti hari ini, itu. Sudah dimenangkan ternyata barang itu *blacklist*. Dua kali, Pak, satu di Cipta Karya, satu di SDA. Saya *enggak* tahu nanti mungkin tahun 2023 ini mungkin di Bina Marga, kali. *Nah*, ini, letaknya di mana ini? Kalau saya minta saran *sih*, diganti saja, Pak, kepala balainya, termasuk juga pokja-pokjanya, diganti saja *gitu loh*, mudah-mudahan ada perubahan. Nah kalau kurang manusia, saya pikir kita bisa minta sama Pak Khalawi ini, Pak Khalawi kan tugasnya itu, Pak, ya? Itu, itu yang pertama di tempat saya.

Dan di tempat saya juga banyak kegiatan akhirnya yang putus kontrak, kalau *single year*, satu tahun pekerjaan, mungkin, ini dua tahun pekerjaan putus kontrak, *nah*, ini akibat apa, *gitu loh*? Apakah akibat daripada tidak mapannya atau tidak telitinya kawan-kawan di BP2JK atau *gimana* atau balainya atau *gimana*. *Nah*, ini ini perlu, Pak. Di tempat saya itu, bahasa begitu *tuh* di warung kopi itu sudah menjadi seperti sesuatu ya, *duh* pokoknya kira-kira *gitu* lah, ya, Pak, ya? Itu pertama, Pak, mohon perhatiannya.

Ya saya juga pernah sampaikan Pak Menteri, kalau memang *toh* tidak bisa begini, ya diganti saja kepala balainya, pokjanya diganti, kan *enggak* ada yang rugi, Pak, ya. Kalau *enggak* susah, kita minta Pak Eddy Santana, Palembang pindah Jambi, Jambi pindah Palembang, *gitu* ya, Bang Eddy ya, *nah*, *gitu*, itu yang pertama.

Terus yang kedua, di Provinsi Jambi itu, pada saat pasca setelah kunjungan Bapak Presiden melihat lokasi candi yang dikatakan candi itu termasuk, bukan tertua ya, artinya bahwa disitu tempat pendidikan, ya, pendidikan atau perguruan atau apa namanya, semua yang sekarang yang tersebar di dunia ini, para guru-guru, suhu-suhunya itu konon katanya dari sana. *Nah*, ini sudah mendapat sorotan dunia dan mendapat bantuan yang istimewa dari pemerintah pusat. *Nah*, saya berharap kegiatan yang ada di Candi Muaro Jambi ini betul-betul bisa berdampak terhadap daerah yang ada di sekitarnya, jangan hanya di sekitar candi itu, diameter sekian, tapi tempat-tempat lain itu tidak.

*Nah*, di sana yang menjadi sorotan juga itu adalah di daerah kawasan itu banyaknya tempat apa namanya penampung batubara itu, *line* apa ya? *Stockpile* ya? *Stockpile*. *Nah*, itu sudah banyak Pak, di mana-mana, sampai hari ini saya lihat belum ada tindakan-tindakan yang signifikan. Saya takutnya nanti candi itu bisa hancur dikarenakan mungkin faktor kimia daripada batubara itu. Bapak kalau dari candi itu menyebrang, lihat di sebrangnya itu penuh batubara semua Pak, wooh. *Nah*, ini ini perlu juga menjadi, bukan, bukan, punya saya agak jauh dari situ, Pak. Nah ini perlu juga menjadi perhatian, Pak Arif.

Terus yang kedua, daerah Jambi juga banyak wisata. Ada namanya tadi Candi Muaro Jambi, sudah itu Kerinci, ada Rumah Tua, ada Geopark ya, *nah*, ini juga perlu menjadi perhatian. Karena saya buka-buka sini tadi ini, *enggak* kelihatan Jambi ini, Pak Arif. Mau ngomong ke Pak Arif *enggak* enak, *enggak*



*ngomong*, nanti orang Jambi bilang *kok enggak dipikirin gitu loh*, paling tidak minta perhatian lah ya.

Terus juga ada yang selalu saya ingatkan Pak Menteri, yaitu Jembatan Sungai Rambut yang bukan semata-mata untuk menghubungkan ke pelabuhan, tapi itu membuka keterisoliran. Karena ada salah satu kabupaten di Jambi ini yang termasuk Kabupaten yang tertinggal, dikarenakan apa? Ada dua kecamatan itu memang terisolir, Pak, daerah rawa, yang posisinya agak ke pinggir pantai.

Terus yang terakhir, Pak Khalawi, ini kalau dulu di perumahan banyak yang kita mau sampaikan, Pak Khalawi, ini sejak di BPSDM ini sepertinya singkat ini. Yang saya harapkan, Pak Khalawi, bahwa salah satu contoh lah ini, di BP2JK ini, Pak. Ini perlu sumber daya manusia yang betul-betul mapan, yang kuat. Jangan sampai saya dengar karena keterbatasan orang, sehingga menceplok saja, Pak. Ada digadang-gadang orang dari Bina Marga *masukin* ke BP2JK, Cipta Karya *masukin* sini, ini *masukin* sini, alasannya karena keterbatasan. Sehingga kadang-kadang kalau sudah, balik lagi mereka, ke Bina Marga balik, ini balik. *Nah*, ini kadang-kadang pindah ke sana itu bawa penyakit, bawa penyakit apa? Penyakitnya itu penyakit kepentingan. Sehingga keberadaan daripada BP2JK ini menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat jasa konstruksi. Itu saja mungkin Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Makasih, Pak Bakri.*

Lanjut, Pak Muhammad Fauzi, silakan.

**F- P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

*Makasih.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
**Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua sekaligus Pimpinan rapat pada siang hari ini,  
kemudian teman-teman Komisi V,  
Yang saya hormati pula Bapak Irjen, Bapak Dirjen BPIW, dan BPSDM,  
dan beserta jajarannya,**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yang sifatnya mungkin mudah-mudahan bisa diperdalam, Pak. Yang pertama untuk Pak Irjen, bahwasannya di anggaran tahun 2022 antara pagu dan penyerapan ada sekitar selisih 11%. *Nah*, selisih 11% ini saya ingin

mengetahui, kira-kira apa penyebabnya dan kemudian strategi apa dalam rangka menyisakan penyerapan yang 11% itu?

Kemudian yang kedua untuk Pak Irjen juga, saya menemukan beberapa kejadian, Pak Irjen, di beberapa titik ya, saya lihat kegiatan-kegiatan pada padat karya kurang memperhatikan SOP. Nah ini butuh diawasi lagi, Pak, ke mana, ke lapangan, terutama yang bersifat padat karya, Pak, ya.

Kemudian selanjutnya, saya mungkin karena ketidakpahaman saya ini Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa melengkapi informasinya. Di setiap kabupaten itu ada Inspektorat juga *gitu*, Pak, tapi ini saya yakin tidak ada koordinasinya dengan PUPR, *gitu*, Pak. *Nah*, tapi mungkin perlu juga dilakukan koordinasi, Pak, karena sepemahaman saya Inspektorat itu adalah bagaimana pencegahan. *Nah*, kadang-kadang Inspektorat di kabupaten, itu kadang-kadang terlalu mudah memberikan data kepada pihak eksternal, Pak, *gitu*. Sehingga menurut saya perlu dilakukan pembekalan lah atau mana yang boleh mana yang tidak, Pak. Sehingga apa, mudah-mudahan dampaknya terhadap pencegahan bisa lebih maksimal.

Berikutnya, saya singkat-singkat saja, ya menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Bakri itu tadi, memungkinkan atau tidak, Pak, kalau seandainya perusahaan yang tidak menyelesaikan kontraknya itu yang di *blacklistnya* itu bukan perusahaannya, Pak, tapi orangnya, Pak, itu memungkinkan atau tidak, *gitu*?

Kemudian ini juga yang jadi masalah adalah persyaratan di pokja juga jadi masalah, karena ada persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi di kabupaten pun saya lihat begitu. Ada yang aneh-aneh sering terjadi, tetapi ya itu-itu lagi, itu-itu lagi, karena memang ada persyaratan khusus katanya. *Nah*, karena itu juga kalau memang harus ada persyaratan khusus, pelaksanaan-pelaksanaan sifatnya yang mendapatkan persyaratan khusus itu harus dibuka selebar-lebarnya, jadi siapapun bisa ikut itu, *gitu*, dengan persyaratan yang memang dibutuhkan, itu untuk Pak Irjen.

Kemudian untuk BPIW, saya sangat berterima kasih kasih, Pak, Makassar masuk salah satu menjadi target kota metropolitan, *gitu*, Pak, ya. Oleh karena itu saya ingin mengetahui, Pak, apakah sudah ada cetak birunya atau skema rancangan pembangunan kawasan prioritas di Makassar, Pak?

Kemudian berikutnya masih untuk Bapak, ini saya ingin menyampaikan saja, Pak, beberapa hal yang sebenarnya sudah saya sampaikan. Tapi saya lihat dalam perencanaan, satupun *enggak* ada, Pak, untuk dapil saya, Pak, *gitu*. Ada yang berlebih, ada yang *enggak* dapat sama sekali, ini. Yang pertama, saya pernah menyampaikan bahwasannya ada desa wisata di tempat kami, di Luwu Utara itu, ya apa, wisata religi makam Datuk Patimbang, itu cukup banyak dikunjungi orang, Pak, jalannya sangat memprihatinkan, *gitu*. *Nah*, karena itu saya mengingatkan Bapak lagi ini, Pak, karena *enggak* ada juga satu usulan saya lihat ini, Pak.

Kemudian masalah banjir, juga kebetulan saya memang setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Sarce tadi, karena kami satu dapil, jadi pemotretannya sama, Pak. Karena sekarang lagi musim hujan di sana, banyak sawah yang tergenang air, *nah*, sehingga panen tidak didapat oleh petani, Pak. Terutama kalau di Luwu Utara itu di daerah-daerah Malangke, di Luwu, benar yang disampaikan Ibu Sarce itu tadi. Jalan rusak, Pak, memang ini juga jadi masalah, benar, mulai dari Palopo, Luwu Timur, Luwu, *gitu* ya, kemudian Enrekang-Toraja, Toraja Utara juga memprihatinkan tuh, Pak, jalannya, Pak, saya minta perhatian Bapak lah.

Kemudian juga saya ingin menagih komitmen daripada apa yang pernah kita sepakati di ruangan ini, antara Kementerian PUPR dengan Komisi V. Terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah bencana, Pak. Sampai saat ini bencana banjir di Luwu Utara itu penanganan drainase kota, ternyata tidak tersentuh juga sekarang, Pak. Padahal kita ada, ada, ada, kesepakatan, ada, ada, ada hasil keputusan rapat kita terhadap daerah-daerah banjir, kemudian daerah terpencil. Daerah terpencil ada Seko, ada Rampi, di tempat kami itu juga belum tersentuh, Pak, itu. Saya sudah sampaikan juga kemarin dengan Pak Menteri, proposal juga sudah saya beri. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, Pak.

Tadi Bapak menyinggung mengenai kemiskinan ekstrem, Pak, ya, ini juga saya ingin lebih rinci, Pak, penanganannya seperti apa, Pak? Bahkan mungkin tapi mungkin tidak tepat, tapi mungkin bisa saja, saya sebagai sumbang saran, Pak, ya. Saya lihat juga kadang-kadang daerah ini *enggak fair* mengenai daerah miskin. Sebenarnya daerah itu sudah tidak miskin ekstrem, tapi karena dapat bantuan, akhirnya masuk, Pak. *Nah*, kenapa ini terjadi? Karena ruangnya seperti itu, kalau mau dapat program, harus masuk dulu miskin ekstrem, kadang-kadang ini menjadi polemik di daerah, *gitu*.

*Nah*, mungkin *enggak*, Pak, kalau seadainya berbasis itu bukan kabupaten, berbasis itu desa. Jadi mungkin itu lebih *fair*, kabupaten juga *nggak* bisa nakal-nakal sekali *gitu*, Pak. Jadi miskin ekstrem desa, bukan miskin ekstrem kabupaten, jadi berbasisnya di desa, bukan berbasis di kabupaten, Pak, itu memungkinkan atau tidak, *gitu*? Ini dalam rangka kita kan bagaimana menanggulangi kemiskinan, bisa lebih maksimal lah. Jangan sampai daerahnya itu-itu juga yang dapat, *gitu*. Sementara yang benar tidak dapat karena memang tidak masuk *gitu*, ya, dia tidak dapat akhirnya, *gitu*. Walaupun saya tahu ini bukan hanya di Bapak, harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain.

Kemudian untuk BPSDM, di tahun 2022, Pak, jumlah karyasiswa program magister didominasi oleh dua dirjen, Pak, ya, SDA 65 karyasiswa dan Dirjen BM 45 karyasiswa. Sementara peserta program di dirjen teknis lainnya pada umumnya sangat kecil, Pak, misalnya Dirjen Perumahan hanya satu, Pak. *Nah*, pertanyaan saya, Pak, apakah ada strategi tertentu ya, atau ada program tertentu hanya di dominasi oleh dua dirjen ini, Pak? Apa mungkin PUPR ada target tertentu ya sehingga pengembangan sumber daya manusia lebih banyak di dua dirjen itu Pak.

Yang terakhir, Pak, untuk Bapak, walaupun ini bukan bidang Bapak, tapi manfaatnya mungkin Bapak bisa memanfaatkan, Pak. Kebetulan kita ini di dapil ada program yang namanya sekolah atau pelatihan pertukangan, Pak. *Nah*, kemarin hampir berjalan di dapil kami, tapi tiba-tiba gagal. *Nah*, gagalnya, batalnya itu karena memang dirjen terkait belum menemukan kata sepakat dengan, ini di bawah Bina Konstruksi kalau tidak salah. Belum ada kata sepakat dengan Tim Sertifikasi Pusat. Kalau teman-teman PUPR kan kegiatannya, kegiatan dulu baru bayar, saya dapat informasi begitu. Sementara Tim Sertifikasi Pusat, bayar dulu baru pelaksanaan. *Nah*, bagaimana itu, Pak, titik temunya mungkin Bapak bisa menginformasikan. Nanti juga dengan Bina Konstruksi, akan tanyakan ini, Pak.

Saya pikir itu, Pak Ketua, *makasih*.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik dari anggota sudah selesai semua?

Oh Ibu Cen, aduh, silakan Bu Cen.

**F- P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM - Pak Khalawi, Pak Irjen, dan  
Pak BPIW, Pak Kepala,**

Saya langsung saja ke Pak Irjen.

Pak Irjen,

Pak Irjen, kan pengawasan internal. Saya cuma ingin menanyakan, di dapil saya, ada beberapa proyek yang putus, putus sepihak. Artinya memang tidak bisa dikerjakan, saya tidak tahu bagaimana, ada tiga kalau *enggak* salah. Setelah itu terjadilah putus hubungan, tetapi ada yang di PTUN-kan. *Nah*, setelah di PTUN-kan, ada yang menang dan ada yang itu, saya tidak tahu, tapi beberapa orang balai itu diperiksa di Kejari. Nah itu kan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus. Apa tindakan Pak Irjen? Apakah itu masuk kedalam pengawasan Bapak? Karena hal itu saya rasa banyak juga terjadi di beberapa daerah, di beberapa provinsi. *Nah*, di tempat saya saja sudah ada itu, sehingga proyek-proyek itu terkendala, merugikan masyarakat, dan merugikan PUPR sendiri. Jadi tolong dibantu dijelaskan, saya *enggak* tahu seperti apa, saya minta penjelasan.

Dan yang seterusnya yang kedua ke Pak Kepala BPIW.

Pak Kepala,

Kita bicara mengenai ekstrem miskin, kita selalu bicara bagaimana mengentaskan kemiskinan. Tapi saya pikir salah satunya adalah harus meningkatkan SDM, kualitas SDM. Salah satu itu, kalau dengan kualitas SDM yang bagus, tentu membuat peningkatan itu lebih mudah, jadi tidak hanya fisiknya saja. Tetapi saya mau minta pendapat Bapak, ini. Untuk meningkatkan kualitas itu, kita perlu sarana dan prasarana. Di dapil saya ada perguruan tinggi, tapi, legalitas ada, tetapi tempat sarana prasarananya tidak ada. Jadi tidak punya kampus, ada muridnya, hanya bisa sekolah di tempat kalau *enggak* salah, pinjam lokal. Dan itu sudah mendapat perhatian beberapa menko, termasuk sudah mendapat rekomendasi dari Pak Mahfud MD dan Menko satu lagi, PMK, juga sudah mendapat rekomendasi itu. Apa tindakan kita, PUPR? bisakah kita membantu untuk pembangunan? Pembangunan perguruan tinggi itu. Jadi kita jangan hanya bicara bagaimana membangun jalan, membangun yang lain-lain, ini yang penting, Pak Kepala. Jadi tolong saya minta di Lingga itu, eh Anambas itu, pulau terluar, saya perlu perguruan tinggi. Jadi tolong nanti masukkan dalam perencanaan, supaya bisa kita bantu.

Itu saja, Bapak-Bapak, Ketua. Terima kasih semua.

**KETUA RAPAT:**

Bu, masih ada di belakang? Bu Sri? Silakan, Bu Sri.

**F- PDIP (SRI RAHAYU):**

*Makasih*, Pimpinan.

**Anggota,  
dan Bapak dari BPIW, kemudian Pak Irjen, dan Sumber Daya BPSDM,**

Yang pertama untuk infrastruktur, Pak BPIW. Kalau misalnya ada sebuah jalan yang itu sangat dibutuhkan untuk memotong jalan itu supaya tidak bahaya, terutama, kemudian dibutuhkan beberapa jembatan. *Nah*, itu kira-kira bagaimana solusinya, karena kalau membangun itu pasti harus ada pembebasan tanah dari pemerintah daerah, padahal itu jalan nasional. Tolong ini saya diberikan pemahamannya untuk hal tersebut. Karena di dapil saya ada jalan nasional, yang itu berbahaya, berkelok-kelok, di dapil Blitar Pak, di dapil saya, di Kabupaten Blitar khususnya di daerah Kesamben, itu sudah dibangun satu jembatan kemudian pemerintah daerahnya tidak sanggup untuk tanahnya, pembebasan tanah, karena itu ada empat seharusnya, tetapi baru satu baru selesai satu kemarin, selesai tahun ini. *Nah*, yang lainnya itu sebenarnya dibutuhkan dalam rangka untuk menghindari kecelakaan. Karena seringkali kendaraan-kendaraan besar yang memuat apa, muatan yang agak, seperti tebu dan sebagainya, pokoknya truk-truk sering nggoling di situ, karena memang jalannya kecil dan miring, tolong saya diberikan penjelasan.

Kemudian selanjutnya terkait juga pendidikan. Ini seringkali begini, Pak, kita ini diberikan pertanyaan, bukan diberikan, ya, artinya kita ditanya, informasinya kalau ada pembangunan sekolah-sekolah itu harus melalui PUPR, atau, saya *enggak ngerti* ini di siapa. Informasinya kalau misalnya ada pembangunan, renovasi atau apapun lah, sekolah yang rusak, harus di PUPR. Tapi di sisi lain, kalau di Komisi X ditanya, kalau kita, ditanya di sini, ternyata bukan, bukan kita, kita hanya membangun yang rusak-rusak berat. Kemudian kalau kita tanya Komisi X, "Itu Komisi V". Nah, tolong saya diberikan penjelasan secara utuh, harus ke mana ini kalau ada aspirasi semacam itu.

Kemudian yang selanjutnya ke BPSDM. Pak, saya mohon dengan hormat, mungkin sudah pernah saya sampaikan bahwa terkait dengan apa, tenaga-tenaga pendamping, tenaga-tenaga pendamping itu seringkali ada yang *double*, Pak, secara teknis. Ada yang misalnya mungkin bersamaan dan mungkin tidak, tidak terkoneksi ya antara dirjen yang satu dengan dirjen yang lain. Misalnya pendamping BPS, satunya pendamping irigasi, ini satu orang bisa pada dua titik itu. Sehingga suatu saat, kebetulan di tempat saya, karena ini *enggak, enggak* ada yang di tempat ke BPS *enggak* mengikuti, ternyata ada juga yang, ternyata dia masuk ke pendamping yang lainnya, jadi satu orang bisa dua titik pendamping. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian, supaya ada koordinasi antara dirjen ketika mengambil tenaga-tenaga seperti ini, supaya efektif juga, *gitu*. Dan selain itu kan juga ada semacam peluang lah untuk yang lainnya untuk bisa bekerja sebagai pendamping. Ini *nih* bukan bukan mengadu, dalam arti ini karena di lapangan seperti itu, dan pada akhirnya tidak bagus begitu dalam kinerjanya, karena pertanggungjawabannya juga *enggak* bagus.

Meskipun memang pendamping itu kan hanya empat bulan ya, Pak, ya. Dulu saya usulkan kalau pendamping irigasi bahkan hanya dua bulan, kalau *enggak* salah. Kalau BPS itu saya kemarin usul jangan empat bulan lah, enam bulan. Karena mereka dikejar-kejar, karena jumlahnya kan banyak kalau BPS itu. Karena jumlahnya banyak, seringkali itu teman-teman dari pendamping itu bahkan kadang ada yang berkorban untuk membantu masyarakat supaya mereka juga cepat selesai, begitu, karena dikejar oleh waktu yang hanya sekian bulan. Dulunya delapan kemudian turun sekarang tinggal empat bulan. Karena laporannya juga rinci *banget gitu*, mulai dari pendampingan, pembangunan sampai akhir itu, rinci banget. Sehingga menurut saya itu perlu juga mendapatkan perhatian untuk teman-teman pendamping.

Terima kasih, Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, sebelum saya lanjut, masih ada yang mau? Pas? Bu Athari? sudah pas? Baik, jadi tepat jam setengah 1.

Waktu untuk Pimpinan, saya, tapi karena ini aturan dari, tidak boleh kita langgar, aturan dokter. Maka saya ingin *break* untuk kita makan semua, biar

nanti kita masuk, baru Pimpinan memberikan pertanyaan dan lain, dan tanggapan dari mitra. Saya skor untuk untuk makan siang sampai jam 1.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT DISKORS PUKUL 12.30 WIB)**

Baik, skors saya cabut ya

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(SKORS DICABUT PUKUL 13.00 WIB)**

Tadi para anggota yang sudah menyampaikan saran dan pendapat, saya tanya lagi dari anggota masih ada? Pak Dewo? Ya, silakan Pak Dewo, saya berikan waktu, seluas-luasnya.

**F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Saya tidak tahu kalau Komisi V ini ada rapat, saya kira rapatnya dimulai jam 1, ternyata dari jam 10 sudah rapat. Syukur saya masih bisa mengikuti.

**Jadi Pak Irjen, Kepala BPSDM, Kepala BPIW, dengan seluruh jajarannya yang saya hormati,**

Kemarin waktu Rapat Kerja dengan Menteri PU saya sampaikan bahwa ada satu tantangan yang mesti harus diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Sesuatu yang sifatnya menurut hemat saya adalah wajib. Karena ini merupakan sesuatu yang fatal bila dibiarkan terus-menerus. Apa itu? Yaitu kepatuhan atau ketaatan hasil tender, hasil kontrak terhadap implementasi pelaksanaan konstruksi, ada korelasinya atau tidak kerja tender dengan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Kemarin saya sampaikan, banyak sekali atau bisa dibilang hampir semua, pekerjaan konstruksi, yang mengerjakan berbeda dengan yang mendapatkan kontrak, dengan yang menang tender. Hampir semua. Padahal kalau dikerjakan oleh pihak lain lagi, dikerjakan oleh sub kontraktor, itu pasti nilai proyeknya tereduksi secara signifikan, signifikan. Jadi tidak hanya sekedar 5%, 10% reduksinya berkurangnya, tetapi signifikan. Misalnya contoh nilai kontrak 90% bisa saja yang dikerjakan hanya 60%-nya. Misalnya yang menang dengan nilai kontrak 75% pun, itupun dikerjakan oleh pihak ketiga, mungkin hanya 50%. Kondisi semacam inilah yang membuat hancur konstruksi kita, kualitas pekerjaannya jelas, tidak akan berkualitas.

Saya hanya ingin tanya kepada Irjen, pekerjaan yang secara sertamerta dikontrakan kepada pihak lain lagi ya, ini kategori melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak? Mohon izin, Pimpinan, saya bertanya kepada

Irjen langsung. Bisa dijawab langsung, ini, itu kategori melanggar aturan atau tidak? Nanti setelah Irjen menjawab, melanggar, ya atau tidak, saya lanjutkan lagi omongan saya. Bisa dijawab oleh Irjen dulu?

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Baik.

**Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Dewo yang saya hormati,**

Secara hukum kontrak, di dalam kontrak sudah ada tertera kegiatan yang dapat di sub-konkan, Pak. Jadi kalau itu tertuang di dalam kontrak, dan parameter yang digunakan dalam pelaksanaan, kalau memenuhi itu, saya rasa tidak ada kesalahan, kekeliruan, Pak.

Namun yang tadi Pak Dewo sampaikan, kemungkinan ada yang di-sub yang di luar daripada ketentuan kontrak, Pak, itu Pak.

Terima kasih, Pak.

**F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Berarti satu pemikiran dengan saya, bahwa yang bisa disubkon ya, itu adalah pekerjaan tertentu. Ya barangkali *item* pekerjaan tersebut memang secara spesifik ya, membutuhkan satu keahlian, ya. Kemudian juga membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi, teknologi yang tinggi. Dalam kontrak itu kan sudah jelas mana yang bisa disubkonkan, mana yang tidak.

Tetapi yang saya maksud adalah banyak sekali *item* yang tidak dalam kategori untuk bisa disubkonkan, tapi disubkonkan. Pekerjaan *cut and fill*, pekerjaan timbunan tanah, pekerjaan apa saja yang ada di dalam kontrak tersebut, itu disubkonkan.

Ini Irjen, kira-kira sudah tahu kondisi di lapangan semacam ini atau tidak? Kalau sudah tahu, kalau sudah tahu, misalnya yang tahu adalah PPK, satker, atau kepala balai, kategori melakukan pembiaran terhadap kondisi lapangan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, apa tindakan Irjen terhadap satuan kerja atau unit struktural Kementerian PUPR yang tahu bahwa itu melanggar peraturan tapi dibiarkan, ya? Kategori melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak? Kepala balai, satker atau PPK.

Kalau ini ditertibkan oleh Kementerian PUPR, tidak ada lagi nanti, kontraktor yang abal-abal itu, tidak ada. Jadi siapa yang menang kontrak, siapa yang menang tender, itu yang dia kerjakan. Kalau pada kenyataan, temuan di lapangan, ternyata dia tidak mengerjakan, langsung diberi sanksi. Saya juga ingin tanya sama Irjen, sanksi yang harus diberikan kepada kontraktor yang semacam ini, itu jenisnya apa, berdasarkan peraturan perundang-undangan



juga? Apakah dia langsung diberi sanksi supaya tidak ikut tender pada pekerjaan-pekerjaan yang lain, ataukah sanksi yang lain berdasarkan peraturan?

Ini mengerikan, mengerikan. Karena konstruksi di negara kita itu, mayoritas dominan adalah di Kementerian PUPR. Tapi kalau Kementerian PUPR tidak bisa menciptakan ekosistem konstruksi yang baik, anggaran berapa ratus triliun pun yang diberikan Kementerian PUPR, itu tidak akan memberikan daya dukung terhadap perekonomian bangsa dan negara, tidak akan. Karena sebentar lagi rusak, sebentar lagi rusak. Sebentar lagi rusak, sebentar lagi rusak, tidak sesuai dengan masa umur konstruksi itu, disebabkan oleh kualitas konstruksi yang tidak bagus. Kualitas konstruksi yang tidak bagus itu dikarenakan oleh berbagai faktor.

Pertama, mungkin karena tendernya yang banting-bantingan dengan harga yang *delosor-delosoran*, harga paling murah itu yang ditunjuk. Tapi ini kan sudah dibenahi oleh Pak Menteri, sudah dibenahi oleh Pak Menteri. Saya kira *enggak* ada atau sedikit sekali kontrak yang kategori tidak bagus. Kebanyakan di atas 80% atau mungkin mayoritas di atas 90%. Artinya dari tahap, dari sisi kontrak tender, tidak ada masalah.

Kemudian bagaimana terhadap pelaksanaan di lapangan? Pelaksanaan di lapangan itu yang tidak secara detail dimonitor oleh Kementerian PUPR. Ada kepatuhan, ada ketaatan tidak? Semua syarat atau dokumen yang dipakai untuk proses itu betul-betul dilaksanakan di lapangan. Syarat tender atau dokumen tender ini, ini digunakan sesuatu yang sakral, karena bisa menggugurkan, bisa memenangkan. Itu artinya sakral, tidak bisa ditawar, ini rigid, sesuatu yang pasti.

Tetapi ketika ini sudah berlalu pelaksanaan di lapangannya, tidak diawasi oleh Kementerian PUPR, sejauh mana tanggung jawab Kementerian PUPR menggunakan uangnya rakyat, uangnya negara, terhadap hal ini, ya? Saya minta Irjen dalam hal ini instrumennya Pak Menteri PU, Pak Menteri PUPR, itu betul-betul melakukan verifikasi factual, ya. Terserah bagaimana cara kerjanya Irjen. Saya kira kalau sampai Irjen tidak mendapatkan temuan di lapangan dari apa yang saya sampaikan ini, itu sesuatu yang tidak mungkin, karena hampir semua pekerjaan, seperti ini pelaksanaannya.

*Nah*, kalau sampai nanti dari Kementerian PUPR melakukan tindakan yang tegas atas temuan yang terjadi di lapangan, saya optimis, Pak, ke depan *enggak* ada yang namanya kontraktor abal-abal. Dia hanya sekedar melakukan tender, ya, kemudian begitu dia menang, dia melepas kepada bendera yang lain, tidak akan berani, kalau Kementerian PUPR memberikan sanksi. Jadi dia akan selalu berpikir secara matang berpikir 1.000 kali, "Kalau saya nanti ikut tender dalam satu pekerjaan tertentu dan bukan saya yang mengerjakan, akan mendapatkan sanksi", itu akan berpikir 1.000 kali.

Jadi di situ nanti tidak ada yang namanya cerita dari siapapun, termasuk dari kawan, "Ini tidak punya AMP ternyata, tidak punya alat berat, ternyata dia

hanya disubkonkan”, *enggak* ada cerita semacam itu nantinya. Inilah proses keadilan yang betul-betul bisa diwujudkan oleh Kementerian PUPR. Siapa yang siap, itulah yang mengerjakan. Siapa yang betul-betul berkompeten untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, dialah yang akan mengerjakan.

Bukan kejadiannya semacam ini, Pak, dia hanya menang tender, kemudian diobralkan kepada siapa saja, ditenderkan lagi oleh dia. Pokoknya siapa yang mau mengerjakan pekerjaan yang rendah itu dia yang kasih. Seolah-olah yang menjadi raja itu adalah pemenang tender. Bahkan dia raja di raja, raja di raja. Karena terus langsung seolah-olah dia yang punya kekuasaan penuh terhadap pekerjaan itu. Lalu lintas keuangan dan segala macam kewenangan terkait dengan pelaksanaan, dia yang menentukan, bukan Menteri PU. Padahal yang sesuai undang-undang, yang diberikan mandat itu adalah Menteri PU, Kementerian PUPR, tapi ini seolah-olah menjadi raja. Ini hanya berubah model saja, Pak.

Kalau di Pemerintahan Orde Baru, itu terang-terangan saja, dikasih, dapat, lobi, disubkonkan, bendera dilepas. Tapi kalau di sini, hanya seolah-olah melalui proses tender, seolah-olah tendernya *fair*. Tapi begitu dia dapat, juga dilelangkan lagi, *enggak* ada bedanya, *enggak* ada bedanya. Jadi seolah-olah yang menang tender ini adalah raja. Dan Kementerian PUPR seolah-olah tidak punya alat kontrol, tidak hanya pengendali terhadap hal ini. Ini perannya Irjen, saya pertanyakan.

Bagaimana peran kepala balai melakukan kewenangannya, Satker dan PPK melakukan kewenangannya untuk kepatuhan dan ketaatan. Semuanya ini diorientasikan untuk menciptakan konstruksi yang bagus. Kalau memang, kalau memang kenyataan di lapangan itu, 60% dari pagu itu bisa terlaksana, ya, tidak perlu harus berupaya untuk tender dengan nilai 90%, *enggak* usah, mungkin kesalahan di perencanaan. Kalau nilai pekerjaan tersebut dengan bisa dikerjakan 60%, kenyataannya di mana-mana, yang tender 90%, kontrak 90%, 80% lebih atau sekian, pada kenyataannya di *real* hanya bisa 60% pun bisa dikerjakan. Berarti salah perencanaan. Ini perannya BPSDM, mungkin begitu Pak. Tapi kita tidak melebar kemana-mana dulu, yang penting saya minta Irjen, kepatuhan dan ketaatan implementasi hasil kontrak terhadap pelaksanaan di lapangan inilah, yang menjadi PR, Pak, yang jadi PR.

Sekarang ini bisa dikatakan bersifat apa namanya, kapitalis bisa, yang dapat pekerjaan ya hanya itu-itu saja padahal dia tidak mengerjakan di lapangan. Banyak sekali jasa konstruksi itu, kontraktor-kontraktor yang susah mendapatkan pekerjaan, ya, padahal dia punya AMP, dia punya *stone crusher*, bahkan dia punya *quarry*, dia punya alat berat. Tapi susah mendapatkan. Dia hanya mendapatkan limpahan dari kontraktor yang lain, yang mendapatkan. Ini kan sayang, Pak. Tolong ciptakan ekosistem konstruksi yang bagus, cek betul di lapangan dan saya yakin semuanya seperti itu.

Dan kalau di internal Kementerian PUPR, balai, satker, PPK sampai tidak tahu, *kebangetan*. *Enggak* mungkin tidak tahu, pasti tahu, pekerjaan ini yang mempunyai adalah A, pemenang tendernya A, tapi yang *ngerjain* B, yang

*ngerjakan* C, bahkan disubkon-subkonkan lagi, pasti tahu. Tapi kalau dia ya, sampai tidak ada penilaian dari Irjen, ini tata cara kerja Irjen, ini yang perlu kita pertanyakan.

Jadi saya kemarin Rapat Kerja dengan Menteri PUPR, sudah saya sampaikan ini, tapi detailnya adalah dengan Irjen, supaya betul-betul menciptakan satu keadilan, Pak. Yang siap, ya betul-betul siap, yang tidak, jangan sampai ikut tender. Jadi *enggak* ada yang namanya pekerjaan ada di Banjarmasin, pemenangnya orang Padang, tapi yang *ngerjakan* dikembalikan orang Banjarmasin sendiri. Kan saya kunjungan kerja spesifik di sana, penataan kawasan. Betul *enggak*, Pak Tamliha? Pekerjaan Banjarmasin, penataan kawasan, yang menang orang Padang, tapi yang *ngerjakan* kontraktor-kontraktor lokal juga di situ. Jadi kalau memang alat berat yang digunakan dalam syarat kontrak, dalam syarat tender itu tidak dicek di lapangan, ya jadinya akan seperti itu, di luar pulau mengerjakan di daerah itu. Itu tidak akan adil, Pak. Niatnya Pak Menteri PUPR itu memperhatikan kontraktor lokal. Tetapi kalau tidak ada satu sistem dan tidak ada ketegasan terhadap mereka yang tidak taat, tidak patuh terhadap pelaksanaan kontrak, ya percuma saja, *enggak* akan bisa menciptakan satu keadilan, itu.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Masih ada? Pak Hartono?

**F- P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Iya, singkat.

**F- P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

*Makasih.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Melengkapi apa yang diurai oleh Pak Dewo, singkat saja, Pak Irjen, ini untuk Pak Irjen. Selama ini proyek Padat Karya Bina Marga itu diambilkan dari kontraktual. Artinya proyek padat karya itu *dititipke* kepada pemborong-pemborong itu, Pak. Teknisnya *kayak* apa, itu tolong Pak Irjen untuk di apa diketahui *gitu* ya, karena itu menjadi rancu. Jadi cenderung proyek padat karya di situ itu seperti kamufase saja, jadi *enggak* jelas, siapa sponsornya itu *enggak* jelas. Tapi yang jelas di kontraktual itu sebagian dipadatkaryakan. *Nah* yang mendapat padat karya itu siapa, *nah*, itu pekerja-pekerja itu lah, diklaim sebagai rakyat, ini.

Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan, kalau perlu, Pak, kalau perlu dan kalau bisa, PISEW, PISEW itu memperbaiki jalan-jalan desa, PISEW itu diambilkan dana dari Bina Marga saja. Sehingga itu sampai pengawasannya nanti menjadi wewenang Bina Marga, pas, Pak. Karena PISEW itu ya apa ya, konektivitas jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan provinsi dan lain-lain. Jadi selama ini yang dilaksanakan itu menurut saya, kamufase saja. PPK menjadi apa, diberi tugas oleh atasannya, apalah namanya untuk apa bekerja, itu diklaim sebagai padat karya.

Saya kira itu, Pak, ini masukan tapi melengkapi sedikit-sedikit yang diurai Pak Dewo, kaitannya dengan kontrak itu. Jadi padat karya itu ikut dalam kontraktual, *nah itu enggak* baik. Saya kira demikian, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Selesai? Pak Hamka?

**F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY., MS.):**

Baik.

**KETUA RAPAT:**

Oke, supaya Pak Tamliha nanti kasih tausiah lagi.

**F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY., MS):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,**

Pak, saya hanya fokus ke Pak Irjen saja, beberapa hal. Yang pertama, tadi saya rapat menyusun Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2021. Salah satu poin yang saya angkat tadi adalah temuan yang ada di Kementerian PUPR, dalam hal ada perbedaan pandangan antara BPK dengan Kementerian Keuangan. Kemarin dalam temuan itu disebutkan bahwa ada belanja barang, harusnya belanja barang tetapi masuk belanja modal, demikian pula sebaliknya.

Penyimpangan tidak terjadi, tetapi secara prinsip akuntansi, itu akan berbeda tampilannya dalam neraca keuangan perusahaan, eh keuangan pemerintah. Makanya tadi ini, karena dipaparkan di Badan Anggaran tadi neraca negara, laporan pertanggungjawabannya, itu yang saya angkat tadi.

Tidak bisa dimasukkan, belanja barang itu dimasukkan dalam belanja modal. Tetapi memang masalah yang timbul di Kementerian PUPR, kalau saya tidak salah jawabannya kemarin Pak Menteri, ya, bahwa itu kesalahan apa, diterima *kok* oleh Kementerian Keuangan, temuannya BPK berbeda. Jadi penemuan itu menurut Menteri Keuangan, oke-oke saja. Tapi dari sisi penampilan akuntansi neracanya, itu pasti tidak oke. Karena kalau belanja barang misalnya, kan pasti misalnya diserahkan ke daerah, Pak, itu kan belanja barang, satu kali selesai. Berarti tidak dibukukan sebagai aset pemerintah. Iya kan Pak ya? *Nah*, inilah yang menjadi perdebatan tadi. Mudah-mudahan ke depan itu, itu tidak terjadi seperti itu lagi. Kita harus apa namanya, petunjuk teknisnya, harus jelas. Kalau memang nanti ada aset atau pembangunan jembatan kah atau pembangunan bendung dan sebagainya mau diserahkan kepada daerah, itu harus betul-betul *clear* bahwa itu belanja barang, satu kali habis, tidak masuk di dalam belanja modal.

Ini yang saya titipkan ke Pak Irjen ke depan, karena kemarin itu adalah kita sudah bicarakan juga hasil temuan BPK 2021, ya kan. Tadi di Badan Anggaran juga saya sudah angkat, itu menjadi catatan khusus, walaupun kita lihat tidak ada penyimpangan. Tetapi ada prinsip-prinsip akuntabilitas yang tidak terpenuhi, itu satu.

Yang kedua, Pak Irjen, soal tender-menender ini, Pak, banyak sekali lika-likunya. Ada juga memang perusahaan itu perusahaan *leasing* Pak, jadi perusahaannya itu di mana-mana dipakai, disebar, padahal satu yang punya, *gitu loh*. Sama tadi contohnya misalnya yang disampaikan oleh Pak Dewo, cuma yang punya perusahaan itu mendapatkan pendapatan sekian persen, maka yang kerjakan itu adalah daerah. Apakah ini sehat atau tidak, ya. Apalagi kalau jumlah tertentu perusahaan besar, kalau dikatakan Mas Dewo tadi mengatakan yang pemenang itu seperti raja. Ini, ini, yang perlu, ini kenyataan *loh* Pak, beberapa yang saya lihat, fakta *nih*.

Perusahaan itu di mana-mana, tender di Aceh, tender di Makassar, tender di mana, itu bukan miliknya sendiri, milik orang lain. *Nah*, nanti kalau menang, pemilik nama perusahaan ini hanya mendapat sekian persen. Itu, Pak, yang saya ingin sampaikan, apakah ini tidak dipantau atau tidak ada kira-kira cara untuk melakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap, benar-benar *enggak* yang punya perusahaan bekerja pada perusahaan itu sendiri. Ini fakta, Pak, sudah terjadi kiri kanan.

Saya kira itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu ada langkah-langkah perbaikan ke depan, karena kita mau melihat ini semua baik.

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik, dari anggota selesai semua ya?

Sekarang dari unsur Pimpinan, Pak Tamliha, silakan.

**F- PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Makasih.*

**Saudara Pimpinan dan Para Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW yang saya hormati,**

Saya malam tadi dapat laporan berupa video terhadap jalan, apa, terhadap jembatan yang menyebrangi sungai Balangan yang pernah ditinjau oleh Komisi V. Jembatan itu sangat fatal, satu-satunya yang menghubungkan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Di bawah jembatan itu Pak, itu semen-semennya berjatuh. Mobil antri, tidak bisa langsung bebas seperti biasa. Padahal itu baru dibangun tahun ini, Tahun Anggaran 2022. Sebelum Komisi V ke Tabalong melalui jembatan itu, diperbaiki oleh kepala balai. Saya tanyakan dengan kepala balai, pemborongnya siapa? Pemborongnya ini, Pak, katanya kontraktornya lulusan dari Semarang. Dia tawar 70% dari pagu. Kalau dia disubkan lagi, maka berarti dia pasti cari untung 5-10%, anggap 10%. Maka si sub-kontraktor akan mengerjakan 60% dari 100%. Sub-kontraktor ini kan juga *pingin* untung, anggaplah dia untung 5-10%, jadi tinggal 50%.

Saya ingat Profesor Doktor Soemitro Djojohadikusumo di akhir-akhir Orde Baru tumbang, itu mengkritik bahwa 30% APBN itu bocor, menguap 30%. Saya pikir waktu dulu, Presiden Soeharto juga tahu bahwa ada kebocoran itu. Di zaman Orde Baru, saya masih ingat, bahwa kalau tender itu, itu yang mendekati dengan pagu, bukan yang paling rendah dari pagu, sehingga layak. Zaman dulu tidak ada digitalisasi, semua dokumen diperiksa fisiknya. Sekarang zaman digital, perusahaan pemenang tender itu bisa memalsukan sertifikat-sertifikat tertentu yang itu bukan miliknya, tapi orang lain.

Saya tanya kepada mereka yang menang tender, apakah pernah panitia tender itu memeriksa dokumen itu? Dengan alasan Covid, tidak pernah memeriksanya. Jadi kesesuaian fisik dengan yang sudah dirubah secara digital tadi, itu perlu mendapat perhatian Bapak, sebagai Irjen. Tiga puluh persen yang menguap yang Profesor Soemitro katakan tadi, itu kan mengalir, jujur saja ketika itu kepada gubernur, kepada bupati sekian persen, walikota sekian persen, DPRD sekian persen, kepala dinas sekian persen, semua dapat bagian.

Tentu Pak Harto punya alasan sendiri, 30% itu menyebabkan bupati punya duit, dia akan berbelanja, gubernur dapat duit, dia akan berbelanja, dan seterusnya, sehingga uang beredar di masyarakat lebih banyak. Bantuan pun

dulu, ya Pak Jhonni Allen masih hidup. Anggota DPRD itu waktu dulu tinggal *ngambil* di kantong saja, *ngasih orang-ngasih* orang, orang beranak, orang sakit dan seterusnya. Sekarang kan mereka *dapet* Covid 3 3, perjalanan itu setengah 6, sehari Pak, 530, setengah 6 namanya.

*Nah*, kalau yang seperti ini, seperti ini, Pak Irjen, pemerintahan yang sekarang bisa dianggap lebih korup dari Pemerintah Orde Baru, dan korupnya itu siapa yang makan? *Nah*, oleh karena itu saya mencurigai dari beberapa tinjauan resmi Komisi V, bahwa seolah-olah ada mafia tender di negara ini.

Oleh karena itu, Pak Irjen, kami harapkan menyampaikan dokumen siapa saja pemenang tender se-Indonesia ini, nah kita teliti jejak rekamnya. Jangan-jangan orang berlima saja bersekongkol di negara ini, tinggal menempatkan pemenang tendernya, bikin pemetaan kawasan, orang Palembang yang menang, yang mengerjakan orang Banjarmasin. *Kayak* kawasan Sekumpul yang Pak Sudewo itu, itu kan 80% dari pagu, dia subkan lagi. Saya terima kasih Pak Irjen tegas, sekarang balai apa itu yang urusan kawasan itu, Cipta Karya. Itu berjanji akan mengganti seluruh batu yang tidak sesuai dengan spek, tentu negara dirugikan.

Jujur saja KPK sudah masuk di situ, dia menyampaikan kepada saya, menunjukkan kualitas batunya, "Kandungan ini sekian persen dari Sucofindo, Pak". Saya bilang, "Kalian Cipta Karya tidak bisa menghindar, kalau kalian tidak ganti sesuai dengan perintah Irjen, bisa masuk penjara". Jangan sampai di peristiwa kami ini ada yang seperti itu. Artinya, komisi tidak bermain, tapi ada pemain-pemain di luar kami.

Kualitas pekerjaan itu kan yang dipentingkan. Kalau direktorat jenderal membuat perencanaan-perencanaan ini, jangan seperti setelah tender selesai, dia tidak melakukan pengawasan, pengecekan dan pembinaan. Seperti *hand up* saja, lepas tangan, dilepas, ini yang negara banyak rugi. Hari ini, Pak, rusak lagi jembatan yang baru setahun yang lalu Jokowi meresmikan, jembatan Alalak itu. Kalau saya ketemu Pak Jokowi, saya bilang, "Yang diresmikan Bapak itu sudah rusak", kan Menteri PU pula yang ditegur, ada videonya, Pak, mereka menyampaikan dengan bukti-bukti.

Dari awal sebenarnya orang Kementerian PUPR itu sudah tahu bahwa dibawah itu bermasalah, yang dimenangkan juga mereka sudah tahu bahwa itu bermasalah, tapi tidak cepat diamputasi. Ini seperti orang kena penyakit diabetes, Pak, sudah rusak, tidak ada pilihan kecuali amputasi. Si pemenang tender ganti dong kerugian negara.

Dulu jembatan itu Pak saya masih DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 20 tahun yang lalu, itu rata-rata 25 tahun baru rusak. Bapak bisa membayangkan, Jembatan Barito yang dibangun oleh Soeharto sudah berusia 25 tahun. Tapi tidak ada saya lihat, upaya-upaya Kementerian PU untuk melakukan pembangunan atau perbaikan jembatan itu. Kalau itu runtuh, Pak, maka tidak ada lagi konektivitas antara Kalimantan Selatan ke Kalimantan

Tengah. Itu waktu peresmian 25 tahun yang lalu adalah jembatan terpanjang se-Indonesia.

*Nah*, kualitas dan jaminan tahunnya itu, apa diatur oleh Kementerian PU? Jadi membuat perencanaan itu ini untuk berapa tahun *sih*? Bukan saya kira sampai Pak Basuki sampai 2024. Mestinya tahunnya sampai menuju Indonesia Emas tahun 2045.

*Nah*, saya merasa penting untuk mendapatkan dokumen pemenang tender dari Kementerian PUPR itu, untuk dilakukan audit, Pak. Auditanya ada dua, yang pertama audit kinerja, yang kedua adalah audit investigasi. Audit kinerja berbeda dengan audit investigasi. Kalau audit kinerja, "Oh ini salahnya orang Kementerian PU, ini sekjennya kurang pengawasan, ini dirjennya tidak mengawal dan tidak membina", akan ketahuan audit kinerja itu. Paling tidak Pimpinan, hari ini kita minta agar dilakukan audit kinerja terhadap pelaksanaan proyek di Kementerian PU itu kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Kalau audit investigasi, itu seperti orang kanker, Pak. Orang kanker, begitu dia kena kanker dia di kemoterapi, semua sel akan mati. Bisa saja Kementerian PU itu sudah berubah nantinya menjadi kementerian yang lain. Saya pernah melakukan itu di Komisi I, ketika saya menjadi Ketua Panja Dana USO, *Universal Service Obligation*. Yang setiap orang yang punya *handphone* itu bayar 1,25% dari penghasilan kotor penyelenggara telekomunikasi, 1,25% dari keuntungan kotornya.

Ternyata program itu namanya Plex and Plex, *enggak* benar, Pak. Kita lihat di lapangan, mobilnya M Plex itu, itu mobil pelayanan komunikasi itu, Pak. Bannya saja sudah kempes. Saya terus ke bawah-bawah, bannya kempes, Pak Jhonni, *enggak* bisa lagi jalan, ditaruh di SMP-SMP, mobilnya di depan. Sama, bukan kempes lagi, sudah ke tanam tanah itu, sebagian bannya itu. *Nah*, akhirnya saya putuskan audit investigasi. Betapa banyak pengusaha pemain itu, pemain ya, pengusaha "pemain", Pak, tidak dibayar oleh Kominfo sampai sekarang. Karena itu amputasi, karena itu pembunuhan kemoterapi pembunuhan terhadap sel-sel itu.

*Nah*, saya yakin Pak Irjen sudah berpengalaman lama di Kementerian PUPR, bisa mengemban tugas itu. Tapi saya minta catatan, saya ingin mendapatkan data-data pemenang tender se-Indonesia tahun anggaran, *enggak* usah tahun 2022, 2021. Supaya kami Komisi V ini akan tahu terang-benderang, jangan-jangan ada mafia peserta lelang di negeri ini. Apa yang tidak bisa di negeri ini sekarang?

Mungkin itu, Pak Irjen, untuk mendapatkan perhatian dan kesungguhan dari kita sekalian.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wallahul muwafiq Illa aqwamith thoriq,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



## KETUA RAPAT:

Ya, semua sudah selesai ya, dari Pimpinan sudah. Selaku Pimpinan, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal. Karena semua apa yang *pingin* saya sampaikan juga hampir semua sudah disampaikan, inilah repot kalau saya yang pimpin, saya susah sendiri. Ya tapi saya akan mencoba melihat beberapa hal.

Yaitu saya ingin, yang pertama, saya ingin buka perbandingan anggaran 2022 dan 2023. Kalau kita lihat anggaran 2022 di Kementerian PUPR, terutama Irjen Kementerian PUPR pada siang hari ini, 2022 itu anggaran Irjen 96,7 miliar 2023 - 90,2 miliar, berarti ada minus 6,5 miliar. BPIW dari 2022 ada 220,12 miliar, di 2023 dapat 140,7 miliar, berarti ada minus 80 miliar.

BPSDM 2022 - 350 miliar, di 2023 ada 399,7 miliar, peningkatan 49,7 miliar. Kalau kita lihat anggaran secara keseluruhan di PUPR itu ada peningkatan dari 2022 dan 2023, ada peningkatan, 27 ya? Ada sekitar 27, peningkatan 27 triliun, ya. Jadi biasanya kalau ada pagu besarnya di kementerian itu naik, maka biasanya setiap satuannya itu pasti naik, *enggak* ada yang kurang. Tapi saya lihat ini ada penurunan di dua sektor yaitu Irjen dan BPIW. *Nah*, ini saya nanti minta tanggapan, *kenapa* bisa turun ya, di Pak Irjen dan Kepala BPIW. Tolong jelaskan, supaya kami juga mengerti, ada kenaikan anggaran di Kementerian PUPR, tapi di dua tempat Bapak ini turun ya, *kenapa*?

Yang berikut saya mulai dari Kepala BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah), berarti Bapak ini kan yang memberikan masukkan-masukkan tentang bagaimana koneksitas terhadap infrastruktur di daerah kami. Tolong, Pak, jelaskan bagaimana penataan infrastruktur di daerah kami khususnya di daerah pegunungan, seperti apa saat ini ya?

Karena kalau saya lihat, terus-terang kalau bicara infrastruktur yang ada di daerah kami khususnya di pegunungan, kita lihat, kita lihat ya pemerintah sudah membuat kemarin ini kan ada program untuk membuka isolasi terhadap penyaluran bahan atau ekonomi untuk buka ekonomi ketertinggalan di P Tengah. Yaitu dengan buka jalan akses ya ke pelabuhan terdekat, yaitu salah satu jalan Wamena-Jayapura untuk akses ekonominya. Tetapi kalau kita hitung jarak yang ditempuh itu hampir 600 kilo itu, ya. Maka dibuka lagi jalan akses Wamena-Nduga ke pelabuhan itu, ada Log Pon, ada apa ya. Itu kalau itu selesai itu hampir jaraknya sekitar hampir kurang 300 kilo lah, 280-an kilo.

Tetapi saya melihat bahwa kemarin itu ada peresmian satu jembatan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu jembatan Pepera, yang ada di daerah Asmat. Dan itu akan menghubungkan Pepera-Kekei dan Dekai di Yahukimo, ini akses yang paling dekat. Itu kalau dari Dekai, Ibukota Yahukimo sampai ke Pelabuhan Pepera itu, cuma 45 kilo, tidak sampai ratusan kilo. Dan pelabuhannya sangat bagus, sudah selesai. Tetapi akses jalannya baru dari Dekai sampai ke Sungai A yaitu yang mau menuju ke Pepera. Akses yang dari Sungai A ini ya, itu daerah Kekei namanya, itu tinggal sekitar 20 kilo lagi akan

ditempuh, ya *enggak* sampai 25, 23-an kilo. Itu berarti akses itu sudah terbuka dan satu jembatan.

Apakah Bapak sudah pernah ya, sampai di sana, ya kan, masuk di dalam petaan Bapak *enggak* untuk pengembangan transportasi di Pegunungan Tengah khususnya di daerah Lapago, ya. Karena menurut saya ya banyak pembangunan infrastruktur yang dibuat, itu tiba saat tiba akal. Tidak dilihat secara baik dulu mana yang paling terdekat yang bisa aksesnya baik dan lokasinya, daerah itu memang sangat baik. Karena kalau yang lain itu menurut saya yang dari Nduga, itu kalau air pasang surut, dia tergantung dengan pasang surut. Kapal besar mau masuk di situ harus air pasangnya besar, ya. Tapi setelah saya melihat yang ada di apa, yang menuju dari Yahukimo, ya, dari Kekei-Pepera Dekai ini, ini sangat-sangat layak dan tidak ada terpengaruh dengan pasang surut. Karena dia ada di muara sungai pas, di depan dan itu sudah jadi. *Nah*, ini kasusnya seperti kasus yang di Depapre, bahwa jembatannya sudah selesai, jalannya hancur-hancuran, sampai sekarang belum selesai, ya kan?

Saya mohon supaya BPIW berikan masukan yang baik, agar ini menjadi case program untuk disana. Sekarang tinggal bagaimana kita buka akses jalan lagi untuk dari Yahukimo-Wamena, itu sekitar tinggal hampir 50-an kilo saja, ya kan, dia tembus semuanya. Akses-akses ini kalau sudah terbuka, itu pasti ekonomi di atas sana *tuh* akan turun jauh sekali, kemahalannya.

Jadi ini yang perlu BPIW mesti harus hadir di sana ya, untuk bisa memberikan pemetaan tentang infrastruktur yang ada. Dan harusnya anggaran BPIW ini harus tinggi, menurut saya, karena itu tidak bisa disurvei dengan jalan kaki, segala macam. Harus dengan pakai heli, pesawat, perlu anggaran itu memang. Kalau tidak dilakukan dengan itu, pasti tidak mendapatkan gambaran yang baik, bahwa ini akses yang terdekat yang bisa dilalui, ya, itu menurut saya, ya.

Jadi itu untuk BPIW, agar benar-benar nanti pemetaan tentang infrastruktur di Papua itu betul-betul, jangan dibuat di atas angan-angan saja, Pak, karena banyak dibuat di atas angan-angan saja, ya kan? Karena dekat sama bupati ini, "Oh ini ada jalan di tempat kita, buat ini semua", begitu. Tapi tidak dilihat secara teknis dan ini *tuh* betul *enggak* itu layak, ya kan? Bukan cuma layak, itu bisa dengan anggaran yang murah tapi mendapat hasil yang baik.

Kita lihat sekarang kan itu yang menuju dari Nduga itu sangat mahal, karena jalan dari Wamena ke Nduga itu dia melewati rawa yang begitu besar itu, saya kira pakai teknologi yang paling canggih itu dipakai di sana itu. Dipasang di bawah dan dikerjakan oleh dari TNI itu, itu di, dikerjakan. Jadi kalau yang dari Yahukimo-Dekai ke jembatan A itu, melewati ke Pepera, itu jalannya tidak ada rawa sama sekali ya, jadi itu jadi.

Yang berikut ke Pak Irjen, saya kira Pak Irjen tadi sudah banyak sampaikan, saya kira kasus-kasus ini yang perlu menjadi perhatian Pak Irjen

dan harus bisa memberikan perhatian khusus, menurut saya, dan berani untuk mengambil suatu keputusan kepada, berikan masukan kepada Pak Menteri atau Pak Menteri bisa berani mengambil satu keputusan untuk bisa keluar dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman. Kasus-kasus yang kita alami dan itu membuat tadi sudah digambarkan oleh Pak Tamliha, bagaimana jembatan yang baru saja presiden resmikan, itu sudah mau rontok. Ya Pak Tamliha ya? *Nah*, itu ada, ada, ada.

Ini nanti dikirim *tuh*, ini bukan katanya, ini ada beritanya lengkap. Bukti, ada bukti di atas sini. Dan ini menjadi masukan untuk dasar agar bisa diambil satu kebijakan untuk diskresi khusus. Saya sudah sampaikan beberapa hal dan itu yang terjadi di daerah kami, ya. Pak Hamka tadi sampaikan ada perusahaan-perusahaan kontraktor *leasing*, itu yang terjadi, Pak. Jadi dibuat kontrak perusahaan untuk di-*leasing*-kan semua. Jadi perusahaannya bisa nanti ada kontrak di Papua, di Makassar, di Kalimantan, di mana-mana, perusahaannya ada di Jakarta, ya kan.

Pemain di daerah, semua punya, punya pegangan, main. Orang ini sudah perusahaannya sudah *blacklist* di sana, dia tinggal ambil perusahaan dari luar, pakai, masuk kontrak, orangnya itu-itu saja ya kan. Teman-teman kepala balai *tuh tau* semuanya di sana, tanya, "Iya, Pak, kita *tau*, ini si ini yang pakai, *nih* kemarin sudah *blacklist* dia di sini, kerjanya *enggak* benar, ini. Tapi kita *enggak* bisa *bikin* apa-apa Pak, aturannya begini sekarang, semua pakai seperti itu", ya kan?

*Nah*, tapi aturan ini sudah berjalan sekian lama, maka harus ada evaluasi. Evaluasi seperti apa? *Nah* itu temuan-temuan itu tolong, Pak Irjen, ini menjadi masukan penting, Pak Irjen, untuk itu. Saya sudah berbicara dengan, panggil duduk berdiskusi dengan teman-teman BP2JK, Balai BP2JK di daerah kami, *enggak* bisa *bikin* apa-apa. Mereka mengerti dan tahu benar bahwa ini pasti bermasalah, tapi tidak bisa ambil satu keputusan karena aturannya seperti ini, Pak. Saya bilang kalau ini, "Pak lebih bagus saya di, Bapak usul saya diganti saja Pak, saya juga setengah mati, Pak, tiap hari saya dimaki, saya disumpahin sama teman-teman kontraktor di sini, Pak. Padahal saya kenal semuanya, saya tahu mereka apa, kontraktor-kontraktor yang baik", begitu. Tapi tidak bisa *bikin* apa-apa.

Maka kata kuncinya cuma satu, Pak, untuk menjaga itu semua, tender itu verifikasi faktual tentang kesiapan perusahaan. Alatnya, semuanya, harus ada. Kalau cuma kertas yang dilihat di dalam, itu *enggak*, ya. Saya kira sekarang ini sudah mulai sistem apa, e-katalog, Pak, ya? Ada mulai dengan sistem e-katalog, ya mudah-mudahan dengan e-katalog ini bisa merubah semua itu. Bisa menjadi satu terobosan untuk kembali lagi kita membuat satu kebijakan-kebijakan untuk bisa menjaga lagi itu kualitas daripada infrastruktur-infrastruktur yang nanti kita putuskan untuk 2023 ke depan.

Karena terus-terang, tolong, Pak, tadi sudah diminta, tolong lihat. Tapi berapa *sih* proyek yang mulai sejak digunakan sistem ini, itu kualitasnya seperti

apa, jalan-jalannya seperti apa itu kualitasnya? Saya kira itu gambarannya jelas itu, Pak, ya.

Dan satu lagi, Pak Irjen, yang ingin saya minta perhatian khusus, Pak Irjen. Kemarin Pak Menteri sudah sampaikan, kita tahu memang keadaan ekonomi kita seperti ini, bahwa harga minyak akan, sebentar lagi akan naik kalau khususnya yang industri ya. Karena kontraktor semua pakai industri ya, bukan subsidi ya?

**F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Pak Ketua, interupsi, Pak Ketua. Sudah naik.

**KETUA RAPAT:**

Iya tunggu dulu.

**F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Sudah naik, BBM-nya sudah naik.

**KETUA RAPAT:**

Sudah naik ya? Oke.

Jadi pasti terbebani, ya kan. Tapi jangan ini dipakai peluang untuk para kontraktor yang sudah kontrak sekian lama, ya, tetapi belum mengerjakan proyek-proyeknya terbengkalai, begitu ada ini, dipakai peluang ini untuk ada revisi anggaran untuk mereka, terutama proyek-proyek yang selama ini kontraknya tidak masuk akal itu, Pak, sampai 30%-an. Begitu ini, kembali lagi mereka, masuk dengan revisi anggaran. Dan ini dipakai juga oleh teman-teman di daerah, di tempat Bapak juga. Maka ini harus, Pak Irjen harus betul-betul kontrol ini, karena ini peluang, semua peluang akan dipakai. Dipakai untuk benar dan tidak benar. Pak Irjen punya tugas untuk jaga yang tidak benar, ya. Ini saya karena Pak Menteri kemarin sudah sampaikan itu, Pak Menteri sangat konsen untuk bagaimana juga menjaga pengusaha ya, tapi jangan peluang ini dipakai yang tidak benar. Itu saya setuju, supaya jangan sampai pengusaha ini dirugikan, ya kan.

Dan berikut. Pak Irjen. kemarin saya juga sudah sampaikan tentang beberapa. Ada kontrak-kontrak. ada pekerjaan yang sampai dari Januari sampai saat ini. masih banyak yang belum dibayar juga. Apakah itu karena hasil pemeriksaan Bapak yang belum merekomendasi untuk bayar dan apa bagaimana, ya kan?

Karena terutama pekerjaan-pekerjaan yang bencana Pak, bencana itu kan pasti dari balai minta tolong untuk pengusaha itu tanpa lelang itu. Tolong kerjakan karena ini bencana *gitu*, jangan sudah diselesaikan sama kontraktor, terus bayarnya sampai bulanan. Kalau cuma sebulan, dua bulan, *enggak apa-*

*apa* Pak, ini dari Januari sampai bulan ini sudah hampir berapa bulan, coba hitung-hitungan, ya kan. Ini harus juga timbal balik *gitu*, jangan pas mau ini minta tolong. Pengusahanya sudah tolong, kerjakan *gitu*, semua sudah selesai, begitu bayar, dipersulit lagi bayarnya, ya kan.

Jadi agar betul-betul, apalagi pengusaha-pengusaha daerah, Pak. Karena biasanya bencana alam itu pasti nanti minta tolong ke pengusaha-pengusaha daerah yang punya alat ada di sana, ya kalau begitu pasti minta tolong kepada mereka. Tapi kalau ada tender yang besar-besar, itu nanti cari dari luar yang masuk untuk ambil. Ini yang *enggak*, tidak *fair* biasanya terjadi seperti itu.

Jadi saya kira itu catatan kami kepada teman-teman mitra, ya, dari kami semua, dari Pimpinan, saya sudah selesai. Untuk BPSDM, saya percaya Pak Khalawi bisa nanti memberikan satu perubahan dengan sumber daya manusia yang ada di Kementerian PUPR khususnya tadi sudah disampaikan juga sama teman-teman tadi, Pak Bakri, bagaimana untuk pokja-pokja di Balai BP2JK. Karena saya juga dapat informasi bahwa itu kan banyak yang diambil, karena ini baru, barang ini. Jadi orang-orang yang ya katanya orang terpinggirkan di balai-balai itu, diambil di sana. Akhirnya mereka itu sekarang *kayak* raja-raja itu, Pak, pokja-pokja itu. Mereka sudah perilakunya *kayak* raja-raja kecil itu, *enggak* ada urusan sama kepala-kepala balai, apa itu, *enggak* ada urusan sama mereka, ya kan. Suka-suka saja mereka, ya kan, padahal harusnya saling mengisi. Karena kepala-kepala balai juga tahu bagaimana kualitas perusahaan atau orang-orang yang di daerah sana untuk bisa diberikan agar betul-betul program pemerintah itu hadir di sana, kualitasnya baik ya dan tepat waktu penyelesaiannya saya kira. Itu yang dapat saya sampaikan Pak mitra, selanjutnya.

Selanjutnya, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman mitra, Pak Irjen dan Kepala Balai BPSDM, dan BPIW, untuk menanggapi saran dan masukan dari anggota ya. Di ini saja, dirangkum saja, dipersingkat, ya, agar waktu kita mungkin bisa, jam 3 bisa selesai ya.

Saya persilakan Pak Irjen duluan.

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Baik, terima kasih.

**Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati,**

Ada beberapa hal yang sudah disampaikan di dalam rapat dengar pendapat ini. Di mana penyampaian terhadap realisasi program 2022 dan rencana RAPBN 2023 dan beberapa masukan dan harapan yang sudah kami perhatikan dan kami akan tindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Contoh ada beberapa hal yang secara umum ditanyakan, *kenapa* progres pekerjaan baik yang ada di Inspektorat Jenderal maupun ada di BPIW ini relatif lebih kecil dibandingkan daripada rencana? *Nah*, ini mungkin kami akan berupaya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, karena *kenapa* hal ini dilakukan? Ini sehubungan kondisi daripada pandemi yang masih ada, kita masih membatasi kegiatan faktual langsung di lapangan, Pak. Jadi sebagian masih menggunakan *hybrid*.

Jadi apakah nanti pekerjaan itu dapat diselesaikan realisasi keuangan 100%? Kami tidak menjawab demikian. Tapi nanti mungkin antara 93 sampai dengan 95%. Juga realisasi terhadap prognosis sampai 2000, eh akhir 2022.

Selanjutnya untuk yang permasalahan-permasalahan tadi yang disampaikan, baik oleh Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota, ini saya rasa sama, Pak, terutama kebanyakan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nanti kami akan menyampaikan ke Direktur Binkon, Pak. Jadi bagaimana langkah Inspektorat Jenderal dapat dilakukan apa yang menjadi masukan, harapan Bapak/Ibu semua tadi. Jadi ada hal-hal yang memang peran daripada Inspektorat Jenderal tidak selinear dengan apa yang Bapak/Ibu sampaikan tadi.

Di Kementerian PUPR, tahun 2019 sudah dibentuk dengan Direktorat atau Unit Kepatuhan Intern, Pak. Jadi di seluruh unit organisasi sudah ada Unit Kepatuhan Intern. Jadi di dalam kementerian, dalam hal ini, Kementerian PUPR melakukan pengawasan dengan tiga lini. Lini pertama ada di balai, Pak, dengan PPK, satker dan kepala balai atau balai terkait. Lini kedua adalah Kepatuhan Intern dan unit organisasi. Dan lini ketiga, baru oleh pengawas intern, Pak.

Jadi mekanisme di dalam hal pengawasan, terutama tadi dampak dari pelaksanaan kualitas pekerjaan, ini yang menjadi tanggung jawab pertama adalah unor teknis yang bersangkutan di lapangan. Nanti kami akan sampaikan juga sebagai apa yang Bapak/Ibu sampaikan di dalam rapat dengar pendapat pada hari ini, ke tindak lanjut rapat dengar pendapat dengan unor-unor teknis yang akan dilakukan besok dan seterusnya, Pak. Ini akan kami sampaikan, untuk menjadi perhatian daripada unor-unor terkait.

Selanjutnya apa yang tadi disampaikan oleh beberapa hal tentang masalah *blacklist* terhadap penyedia pelaksana pekerjaan, yang tadi disampaikan juga contoh yang disampaikan oleh Pak Bakri, ada pemenang tender sudah dimenangkan tetapi dibatalkan tendernya karena ada diketahui terhadap *blacklist*. Pokja melakukan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa terhadap dokumen yang disampaikan dan dokumen yang ada di LKPP, Pak. LKPP itu terhadap daftar perusahaan penyedia jasa yang masuk dalam kategori *blacklist* yang ada di INAPROC.

Kemungkinan kejadian yang disampaikan seperti yang disampaikan Pak Bakri tadi, kemungkinan di INAPROC, pokja tidak menemukan daftar *blacklist* perusahaan tersebut, tapi didapatkan dengan cara yang lain. Misalnya ada

masukkan dari para pihak, dan kondisi tersebut divalidasi kepada kuasa pengguna anggaran atau kementerian atau lembaga yang memberikan apa, memberikan *blacklist* tersebut dan apabila ini dikatakan benar, maka pekerjaan tersebut dapat dibatalkan, pemenang tersebut akan dibatalkan. Dan memang ini ada, Pak, ada terjadi di beberapa kegiatan seperti itu. Ini tadi yang contoh seperti disampaikan oleh Pak Bakri.

Mungkin yang selanjutnya, hal-hal yang sama, masalah kondisi daripada kegiatan Padat Karya. Nanti kami akan menyampaikan juga ke Dirjen Bina Marga, yang ditanyakan tadi. *Kenapa* Padat Karya yang ada di Bina Marga ini seperti mengambil kegiatan yang ada dilakukan oleh penyedia jasa melalui kegiatan preservasi. Memang kita ketahui, Pak, kegiatan Padat Karya yang ada di Bina Marga berbeda dengan kegiatan Padat Karya yang ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Cipta Karya. Jadi memang tidak ada yang spesifik pekerjaan Padat Karya yang ada di Bina Marga. Mudah-mudahan ini jadi masukkan, Pak, bagi kami di Kementerian PUPR dan kami nanti akan menyampaikan di dalam pelaksanaan lebih detail kepada Direktorat Jenderal atau Bapak Dirjen Bina Marga.

Selanjutnya yang tadi disampaikan juga terhadap, ada beberapa kegiatan di dalam pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak itu tidak tabu di dalam proses pelaksanaan kontrak, karena dia tersirat dan tersurat di dalam kontrak, itu ada hukum, ada kriteria ada fase-fasenya. Tadi Ibu Cen Sui Lan juga sudah menyampaikan, ada yang sudah masuk ke dalam ranah aparat penegak hukum, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi sejauh komunikasi dapat dilakukan karena proses pemutusan kontrak adalah mekanisme daripada hukum kontrak. Itu tersurat semua itu di dalam kontrak, kapan waktunya.

Kondisi yang ada juga diperkuat dengan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2018, di mana apabila kontrak akan diputuskan, di-*blacklist*, sebelum dilakukan *blacklist* yang akan diajukan kepada LKPP, wajib dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau APIP. Jadi APIP melakukan, membuat rekomendasi terhadap keputusan pemutusan kontrak tindak lanjut daripada *blacklist* yang akan dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran. *Blacklist* yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran memang menjadi kewenangan daripada kuasa pengguna anggaran, yang harus dilakukan tindak lanjut dan setelah itu baru disampaikan ke LKPP untuk dapat diumumkan secara nasional melalui INAPROC.

Itu mungkin beberapa hal, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Sudewo, yang disampaikan oleh Pak Hamka, ini juga menjadi perhatian kami, Pak. Contoh, apakah ada yang dipertanyakan oleh Bapak/Ibu sekalian terhadap dampak yang diberikan terhadap temuan-temuan. Ada, Pak. Perusahaan itu di *blacklist* dan PPK-nya diminta untuk diganti. Ada, Pak, diketemukan itu apa yang Bapak sampaikan.

Namun seperti tadi kami sampaikan, Kementerian PUPR mempunyai tiga landasan lini pengawasan. Arti kata misalnya ada pekerjaan tidak baik di

lapangan, Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern, tidak dapat langsung masuk seperti apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu sekalian. Ada mekanismenya. Melalui apa? Pengawasan yang perlu dilakukan ketat di tingkat lini pertama oleh balai, PPK dan Satker. Biasanya, kami mendapatkan hal ini misalnya bisa didapat dari pengaduan, permintaan daripada pimpinan organisasi, Pak, untuk dilakukan objek dengan tujuan tertentu.

Selanjutnya mungkin yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, Pak Tamliha, bahwa contoh seperti untuk melakukan audit kinerja, memang selama ini kami lakukan, Pak. Dan kami langsung memberikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh pimpinan unor selambat-lambatnya 60 hari kerja, Pak. Untuk investigasi, kami tidak melakukan untuk generic, Pak. Tetapi potensi kerugian negara yang akan timbul, baru kami melakukan audit investigasi. Dan ini konsekuensinya, setor ke kas negara, pejabat diberikan sanksi hukuman berat, hukuman sedang, maupun ringan. Jadi potensi terhadap kerugian negara, APIP melalui, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, melakukan audit invetigasi, ada potensi, Pak, yang disebut dengan kerugian negara.

*Nah*, ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu sekalian menjadikan bahan bagi kami untuk memberikan arah kebijakan pada unit-unit organisasi teknis yang terutama tadi di dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Terutama Inspektorat, eh terutama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan, Pak.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Inspektorat Jenderal. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kaban BPSDM dan BPIW.

**F- PDIP (SRI RAHAYU):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya, silakan, Bu.

**F- PDIP (SRI RAHAYU):**

Iya sebelum pindah ke yang lain. Tadi kan kalau ada laporan dan seterusnya, Bapak baru bertindak begitu, ya. Saya ingin menanyakan, kemarin kita, Komisi V, akan melakukan kunjungan spesifik ke Bogor. Yaitu meninjau pembangunan rumah susun STIE Tazkia Cendikia. Tapi tidak jadi dilaksanakan karena infonya ada masalah, sehingga kita tidak jadi ke sana, kita *enggak* tahu persis alasannya, sehingga dipindahkan ke Depok kemarin.

*Nah*, mungkin Bapak sudah tahu lebih awal, tolong dijelaskan kepada kami infomasi-informasi itu, sehingga kita juga tahu, ada apa sebenarnya pembangunan itu.



Terima kasih, Pimpinan.

**F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan,

Saya ingin menambahkan dari apa yang saya sampaikan tadi.

Pak Irjen,

Kira-kira Pak Irjen akan membuat suatu sistem untuk melakukan verifikasi secara faktual bahwa proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh pemenang tender atau tidak? Itu kira-kira Irjen konsisten akan mengecek itu atau tidak?

Yang kedua, bilamana itu nanti didapatkan, sanksi apa yang diberikan kepada kontraktor pemenang tender yang tidak mengerjakan sendiri, ya kira-kira sanksi apa, mesti Pak Irjen bisa menjawab sekarang, karena landasan hukumnya pasti ada. Jadi aturan yang digunakan untuk memberikan sanksi terhadap kontraktor yang tidak mengerjakan sendiri itu pasti ada aturannya dan kira-kira apa sanksi yang akan diberikan?

Yang ketiga, terhadap internal Kementerian PUPR yang jelas tahu dan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran aturan bahwa itu tidak dikerjakan sendiri oleh kontraktor, kira-kira sanksi jenis apa yang diberikan kepada mereka, kepada internal Kementerian PUPR? Taruhlah yang tahu adalah PPK, bahwa itu dikerjakan oleh kontraktor lain. Tapi PPK diam, tidak memberikan laporan kepada satker, apa? Kalau PPK, Satker dan Balai sampai tahu, semuanya, tahu sanksi apa yang diberikan? Saya kira Irjen bisa menjawab sekarang. Karena ini merupakan suatu pekerjaan dan ranah daripada tupoksinya.

Karena kalau sampai kontraktor, pekerjaan itu, dikerjakan oleh kontraktor lain, bukan kontraktor pemenang tender, menurut hemat saya itu adalah pelanggaran kelas berat, pelanggaran kelas berat. Hukumannya ya setimpal, ya berat. Jadi jangan menilai satu pekerjaan itu ya, setelah pekerjaan selesai. Justru pekerjaan dinilai itu pada saat prosesnya. Untuk mengantisipasi supaya pekerjaan itu gagal konstruksi atau konstruksinya itu kualitasnya tidak baik. Itu sebagaiantisipasi, itu justru pada saat prosesnya.

Saya minta oleh Irjen menjawab ini, besok dengan dirjen-dirjen yang lain juga akan saya tanyakan itu. Kalau sampai dirjen itu juga tahu bahwa pekerjaan di internalnya dia, di unit direktoratnya dia, dikerjakan oleh kontraktor yang bukan pemenang tender, itu juga dibiarkan, ini terhadap dirjen, apa yang harus diberi sanksi, ya? Ini kelas Dirjen, ya kan. Tapi untuk mengetahui sejauh itu mungkin agak sulit, yang jelas, PPK, Satker.

Jadi, Pak Irjen, kita memang harus satu bahasa, untuk menciptakan konstruksi yang berkualitas ini memang harus satu bahasa. Dan untuk

menciptakan rasa, keadilan, Pak, menciptakan rasa keadilan. Bahwa yang memang tidak siap untuk melaksanakan pekerjaan sendiri, ya jangan ikut tender nantinya begitu, itu namanya rasa keadilan, itu.

Jadi saya minta, coba dijawab saja Pak Irjen, karena kontraktor yang menang tender tidak mengerjakan sendiri, ini kategori pelanggaran kelas berat. Kalau pelanggaran kelas berat saja sampai dibiarkan, itu juga sangat keterlaluan. Karena risikonya sangat besar, akibat daripada itu risikonya sangat besar. Kemudian menjadi kanibal terhadap internal konstruksi itu sendiri. Jadi saya kira itu, jadi saya minta Irjen jelas, memberikan tanggapannya yang

**KETUA RAPAT:**

Iya iya sudah, biar, Pak Tamliha, silakan.

**F- PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Saya ingin minta penegasan saja, Pak Irjen, tidak melakukan, selama ini penyeleksian terhadap dokumen itu *hybrid* ya? Tidak fisik? Ya kalau tadi kan Bapak bilang *hybrid*, karena musim Covid. Saya khawatir sertifikat yang dirubah-rubah secara digital itu, itu kan menyangkut administratif. Kesalahan administratif adalah pintu masuk orang untuk melakukan korupsi. Jadi kalau ada pemenang tender ternyata sertifikat itu *kagak* benar, bodonglah bahasanya, curi-curi punya orang, atau minjam punya orang, kemudian dilapis perusahaannya secara digital. Apa itu dibiarkan Pak Irjen, oleh LKPP?

Maka itu saya penting minta dokumen itu. Sehingga saya akan tahu, syarat lelang itu kan lulus begini-begini, syaratnya. Saya secara digital, bisa mencari perusahaan itu, apa betul dia punya sertifikat yang dia berikan kepada panitia lelang itu? Itu pentingnya, Pak Irjen.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Pak Ketua.

**F- PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Izin, saya Pak Ketua.

**F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Pak Ketua, sedikit.

**F- PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Saya sedikit, lebih sedikit lagi.

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Willem, jangan lama-lama, satu menit saja paling lama.

**F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Pak Irjen,

Perlu saya ingatkan lagi terkait penyelenggaraan infrastruktur di tujuh wilayah adat tanah Papua, itu diharapkan supaya disesuaikan dengan tingkat *cost* dan inflasi di tujuh wilayah adat masing-masing. Karena masing-masing daerah tentu memiliki ciri khas yang berbeda. Jangan sampai terjadi penyamaan definisi dan diperlakukan sama, tanah Papua.

Yang berikut kepada BPIW, kepada Kepala BPIW, untuk melakukan studi kelayakan terhadap sejumlah pembangunan jembatan gantung di wilayah Pegunungan Tengah, supaya kami bisa koordinasi dengan Dirjen Bina Marga. Dan untuk itu bisa koordinasi dengan Kepala Balai Pegunungan Tengah.

Sekian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya baik.

Pak Bakri, jangan panjang, satu menit juga.

**F- PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Setengah menit, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**F- PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Jadi *gini*, Pak Irjen. Saya itu bertanya di Jambi itu, *kenapa?* Saya merasakan dua kali Pak, sesuatu yang sekali oke, dua kali ini. Terus yang lebih parah lagi, pekerjaan itu terganggu, sampai hari ini Pak, saya *ndak* tahu, mungkin sudah selesai baru-baru ini mungkin ya. Kira kira satu bulanan itu masih ada pekerjaan yang kadang-kadang addendum, addendum, addendum, adendum terus. Denda ke denda ke denda, ke denda, ke denda lagi, *gitu*.

*Nah*, harapan saya ada nggak rumusan yang memang betul-betul bisa langsung. Jangan sampai sudah satu bulan, apalagi kalau mereka sudah ambil uang muka, sudah mulai apa, ini dampaknya ke pekerjaan, Pak. Kalau sekali mungkin saya memaklumi kemarin, ini dua kali. *Nah* ada *enggak* rumusannya, sehingga, dulu-dulu *enggak*, cantik-cantik *enggak* tahu *nih*.

Makanya saya tidak menuduh balai ataupun tidak, saya berharap bahwa betul-betul yang begini-gini itu, jangan sampai terjadi di daerah-daerah yang mungkin, ya, karena dampaknya ke pekerjaan. Itu Pak, terjadi di Cipta Karya, bikin sekolah. Kerjanya jelek sekali, Pak, sampai-sampai Kepala Balai Cipta Karya sama PPK Satkernya itu bukan main, sudah stress, Pak. Karena apa? Karena belum lagi bicara sub ngesub, sub ngesub ini.

*Nah*, jadi intinya saya menginginkan bahwa kawan-kawan yang memang bidangnya seperti Balai BP2JK itu, ya *mbok* harus betul-betul jangan percaya *aja* apa yang *diumumin*. Tapi mencari mendeteksi, bagaimana. Kan tahu itu Pak, pekerjaan-pekerjaan di mana, apa semua-semua. Hari ini saya rasakan, Pak, sekolahan itu kalau tidak dipelototi oleh saya dan kawan-kawan satker dan PPK, asal-asalan kerjanya, Pak. Sehingga saya itu yang saya selaku dapil Jambi, itu semua nomor telpon kepala sekolah itu saya bikin grup, saya bikin grup, Pak, sehingga setiap saat tahu kerjanya apa. Tapi memang betul-betul ya *udah* lah kalau pekerjaan sudah ngesub dua tiga empat kali itu, sudah.

Jadi keinginan saya, ada sistem yang betul-betul mungkin bisa mendeteksi hal-hal begini. Karena ini terjadi di tempat saya, Pak, dua kali terjadi, Pak Irjen. Saya harap mudah-mudahan tidak ketiga kalinya lagi lah, *makasih*.

#### **KETUA RAPAT:**

Iya baik, sebelum ke Pak Dirjen, saya kira saya juga ingin garis bawahi beberapa hal, Pak Irjen.

Pak Irjen,

Bahwa apa yang disampaikan teman-teman, karena tadi saya mendapat tanggapan Pak Irjen *tuh* ya seakan-akan masih belum, kita belum dapat satu keyakinan bahwa Pak Irjen selaku yang ada di kementerian yang bisa kita harapkan untuk membenahi itu ya, kita belum dapat satu gambaran bahwa Bapak bisa *gitu*, Bapak masih bilang bahwa di sini ada ini, ada ini, ada ini, ya susah kita ya.

Pak Irjen, kita harap melalui Saudara Irjen, bisa ada perubahan di sana, ya. Karena terus-terang saya merasakan, karena ini selang satu rumah, ya kan, ini ada, ya kalau tidak sampai *blow up* ke atas besar, baru kita kenakan sanksi. *Kayaknya* ada saling menutupi, "Kalau ini ada ini ya kita tutup dulu lah, jangan sampai keluar *kayak gin*". Ini yang kita rasakan, saya pun merasakan seperti itu. Bagaimana balai saya sampaikan untuk melakukan perlawanan, tidak. Padahal beliau sampaikan juga bahwa ini tidak masuk akal *gitu*, ya lakukanlah

perlawanan, *gitu*, PPK jangan ini *dong*, tapi tidak mau, *gitu*, ada apa itu, ya kan? Ini yang kami rasakan, *gitu*.

*Nah*, kali ini kami duduk dengan Saudara Irjen, saya rasa juga seperti itu, ya kan, maka teman-teman masih sanksi, ya kan. Dan banyak sekali juklak juknis ini yang selalu disamakan kita semua, ya. Padahal di daerah kami itu harusnya ada diskresi khusus untuk daerah kami, di Papua khususnya, ya kan. Ini harus ada *gitu*. Ya seperti tadi saya sampaikan kalau di Jawa ini bolehlah kertas-kertas, gampang, banyak materialnya di mana bisa punya ini, bisa ambil tempatnya, ya kan.

Tapi kalau di daerah kami, daerah itu sangat terbatas, mobilisasinya sangat susah, sangat sulit. Maka ada diskresi khusus untuk itu, jangan semua disamakan itu juklak juknisnya. Maka itu membuat kendala yang sangat besar untuk daerah kami.

*Nah*, satu lag, Pak, tadi sudah ditanya terus, bagaimana dengan kalau itu di sub-subnya? Itu masih mending, Pak. Kalau misalnya besok dia menang, tiba-tiba dia mundur, sanksi apa Pak? Kalau dia bikin tiga perusahaan A, B, C, semua masuk nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Supaya ambil angka terbaik, dia *ilangin* 1 2, dimenangin yang 3, itu apa sanksinya, Pak? Harus ada sanksi, Pak. Sekarang dia sudah menangkan tender, tiba-tiba dia tidak sanggup, enak saja. Proses tender ulang lagi, Pak. Ini, ini, ini ada sanksi *enggak*, Pak, seperti ini, iya kan? Ini, ini, kejadian, ini.

Ya tolong Pak Irjen, ini yang kami inginkan supaya kami memberikan suatu harapan besar Bapak bisa melakukan, kendalikan itu semua, memperbaiki itu, ya kan. Melalui Bapaklah ke Pak Menteri, ambil satu diskresi khusus untuk hal-hal seperti ini, supaya jangan terjadi. Bisa saja besok saya bikin 10 perusahaan masuk semuanya tawar ini, saya kasih gugur semua yang di atas, yang terbaik, saya ambil untungnya. Bisa itu dilakukan. *Nah* untuk jaga itu seperti apa? Ada *enggak* di dalam aturan-aturan kontrak itu. Tolong, Pak, jelaskan kepada kita, saya kira itu, ini yang paling penting untuk kita ya.

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Baik, terima kasih, Bapak Pimpinan.

Tadi yang disampaikan pertama oleh Ibu Sri, kami belum tahu, Bu, informasi yang Ibu sampaikan, ini secepat mungkin saya akan tanya ke dirjennya akan saya kabarkan ke Ibu. Ya melalui Ibu, iya, komisi melalui Ibu. Nanti kami akan cek, Pak Pimpinan.

Terus selanjutnya yang disampaikan Pak Sudewo tadi, kalau ini ada pekerjaan sub, apa sanksinya seperti apa? Tadi saya sudah menyampaikan, di dalam kontrak juga ada kriteria batasan standar daripada sub kontraktor setiap pekerjaan. Tapi sebenarnya mekanisme itu harus diketahui oleh PPK, Pak, satker, ya, oleh PPK satker itu harus dipahami secara baik. Terus apabila

ada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan tidak sebagaimana mestinya, Direktorat Jenderal melalui Kepatuhan Intern, Pak, harus melakukan investigasi ini, ya melalui balai-balai tadi. Memang nanti apabila hal itu dapat diteruskan kepada APIP, pengawas intern di Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal akan mengambil langkah-langkah pengawasan internnya, Pak.

Terus tadi, Pak Willem, terima kasih, Pak, nanti juga akan disampaikan oleh Pak BPIW terhadap strategi yang disampaikan, mengingatkan terhadap pelaksanaan infrastruktur pada tujuh wilayah Papua tadi, Pak.

Selanjutnya untuk yang Pak Pimpinan, Pak Syaifullah tadi, mengenai kondisi daripada sertifikat, Pak, yang diduplikasi, Pak Tamliha, itu sebenarnya ranahnya di Pokja, Pak, di Pokja BP2JK. Nanti mungkin di dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Bina Konstruksi bisa diperdalam Pak, kami akan menyampaikan hal itu. Nanti hal-hal yang seperti apa yang disampaikan di dalam upaya-upaya langkah pengambilan keputusan di dalam hal pemberian sanksi dan sebagainya, akan kami sampaikan, Pak, kepada pelaksana kegiatan yang berhubungan apa yang Bapak/Ibu sampaikan.

Saya ingin menegaskan apa yang Bapak Pimpinan barusan sampaikan, Pak Roberth Rouw, Pak. Apabila ini saya sampaikan ke seluruh Bapak/Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati dan terhormat, apabila ada hal-hal yang ditemukan di lapangan Pak, suratkan, Pak, kepala balai suratkan ke Irjen, Pak, kasih tahu. Kalau dia takut ke dirjennya, suratkan ke Irjen, Pak. Ya atau dia tembuskan kepada dirjennya, Pak, kami akan mengambil langkah-langkah apa-apa yang Bapak harapkan tadi. Jadi kadang-kadang kita tidak mendapatkan informasi, sehubungan dengan pelaksanaan masih tanggung jawab di unit organisasi.

Namun apabila seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada kekhawatiran daripada PPK atau Satker karena ultimatumnya begini, sampaikan, Pak, suratkan ke Irjen, kami mengambil langkah-langkah.

**KETUA RAPAT:**

Pak, saya sangat konsen soal itu. Makanya apakah harus mereka saja yang bikin surat ke Bapak, baru Bapak turun? Anggota Dewan, kita, bisa *dong*?

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Bisa, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Jadi kita harus buat surat temuan kita.

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Baik.

**KETUA RAPAT:**

Minta untuk Inspektorat Jenderal turun?

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Boleh.

**KETUA RAPAT:**

Ya?

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Bisa.

**KETUA RAPAT:**

Bisa ya?

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Bisa.

**KETUA RAPAT:**

Oke, Pak Cen?

**F- P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Pimpinan.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Bu Cen Pak, Bu Cen.

**F- P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Saya melihat jawaban Pak Irjen ini, Pimpinan, yang bagus-bagus saja. Artinya, tak mungkin balai itu berani bersurat, itu tidak mungkin, apalagi

langsung ke Pak Irjen. Jadi apa sebenarnya pengawasan kita itu apa? Jadi seharusnya kita yang melaksanakan itu. Tak mungkin kita harapkan dari, dari balai menyurati Bapak.

Yang kedua, Pak Irjen, yang Bapak sebut tadi, secara regulasi memang betul sudah ada payung-payung hukumnya itu. Tapi yang terjadi di lapangan, memang seperti itu, putus kontrak di PTUN-kan dan itu membuka peluang untuk pihak-pihak, pihak-pihak aparat untuk datang memeriksa. Dan itu kan merugikan pihak Bapak, bukan dari kita. Jadi itu yang perlu diantisipasi.

Itu saja, Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya saya kira Pak Irjen lanjut, ya. Iya 15 menit lagi ya? ini sudah jam 3, tadi kita ingin jam 3 selesai.

Cuma karena memang kita pendalaman soal ini, yang terutama soal pengawasan ini, ini yang buat, tapi, saya ingin ini lagi satu, Pak Irjen, bahwa kalau sudah diangkat di RDP, maka ini *enggak* perlu surat lagi, Pak Irjen ya, harus Pak Irjen turunkan ini untuk menjawab ya, menjawab hasil temuan teman-teman yang disampaikan di dalam RDP ini, ya. Jadi tidak perlu kami pakai surat, karena ini sudah terbuka di RDP, maka saya minta Pak Irjen untuk langsung investigasi apa yang telah kami sampaikan.

Ya silakan, Pak Irjen.

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Baik.

**Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian,**

Apa yang sudah dijadikan bahan masukan bagi kami, Pak, akan kami tindaklanjuti dan memang benar, Pak, tidak mesti permohonan surat dari Balai atau dari Satker, PPK, Bu Cen Sui Lan juga sudah mengatakan, Bapak Pimpinan juga sudah menyampaikan tadi, bahwa bisa, bahwa di dalam RDP ini juga menjadi, Pak, bahan tindak lanjut yang akan kami lakukan.

Mungkin itu Pak yang dari Inspektorat Jenderal, beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas masukkan saran dan pendapat terhadap Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.



Ke Pak BPSDM.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr.  
Ir. KHALAWI AH, M.Sc., M.M., IPU):**

*Makasih, Pak.*

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr.  
Ir. KHALAWI AH, M.Sc., M.M., IPU):**

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,**

Apa yang tadi disampaikan Pimpinan dan anggota, menjadi konsen buat Bapak Menteri dan kami semua sebetulnya. Untuk itu,

**Pak Ketua, Pimpinan, dan Bapak Anggota Komisi V,**

BPSDM dalam waktu dekat ini, pertengahan September, akan melakukan *profiling*, Pak. *Profiling* terhadap pokja, PPK dan Satker. Jadi harapan Bapak/Ibu sekalian untuk melakukan perubahan-perubahan pemerintahan. *Profiling* ini betul-betul akan mengetes karakter daripada PNS atau pokja yang bersangkutan, PPK dan Satker. Dengan melibatkan psikolog dan dokter menggunakan alat neuro behavior. Yaitu untuk mengetes karakter atau sinyal otak kita. Jadi kalau ada seseorang pokja misalnya yang punya karakter jahat untuk menipu, itu akan ketahuan.

Jadi kami akan melakukan *profiling* dalam waktu dekat 1.000 orang, kemudian kita pilih 500 orang, atas arahan Pak Menteri, akan dikirim ke Bela Negara di Batujajar selama dua minggu. Ini dilakukan di bulan Oktober, untuk menjawab tadi untuk perubahan ke depan karena akan segera sebentar lagi akan melakukan lelang ini, sehingga pokja akan kita kumpulkan, kita *profiling* bersama PPK-nya. Kemudian kita kirim ke Batujajar untuk di Bela Negara, *nah*, ini *moga-moga* pulang dari sana akan ada perubahan. Dan dari *profiling* itu nanti kita akan ketahuan, yang memang punya karakter untuk penipu dan sebagainya itu mungkin kita akan nanti Pak Irjen menindaklanjuti selanjutnya untuk apa di-*drop*, atau dirjen yang bersangkutan.

Itu, Pak, untuk tadi apa yang harus kita lakukan menghadapi lelang-lelang yang seperti ini. Tadi Pak Irjen sudah menyampaikan, tugas Pokja lah untuk memverifikasi dokumen-dokumen dari lelang itu, tadi sudah disampaikan Pak Irjen.

Yang kedua tadi Pak Eddy Santana, kami tetap, Pak, jadi kerja sama dengan negara lain terutama Belanda, Prancis, Korea Selatan, Jepang, itu tetap kita laksanakan. Namun untuk BPSDM memang di untuk bidang pendidikan dan pelatihannya. Sedangkan untuk teknis, tetap di unor-unor teknis, misalnya di SDA dengan Belanda dan Prancis. Bina Marga di Inggris, Australia dan sebagainya. Jadi tetap tadi kita malah lebih banyak lagi kita untuk, bahkan LPDP itu tadi Pak Menteri minta 100 orang per tahun, Pak. *Makasih.*

Untuk Pak Ishak Mekki, *enggak* ada, nanti kita jawab secara tertulis, *makasih.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Saya ingin menambahkan untuk BPSDM ya, karena BPSDM ini merupakan pilar keberhasilan Kementerian PUPR untuk mewujudkan konstruksi yang baik. Jadi saya minta BPSDM melakukan satu pemetaan terhadap kondisi sumber daya manusia yang ada di Kementerian PUPR. Dari sisi perencanaan, kemudian yang bertugas terhadap pengawasan, kemudian yang bertugas terhadap evaluasi, juga termasuk yang kepatuhan. Supaya apa yang disiapkan oleh BPSDM, itu betul-betul sesuai dengan orientasinya. Jadi *nyambung*, ada korelasinya dengan pekerjaan-pekerjaan Kementerian PUPR.

Karena segala kegiatan pelaksanaan konstruksi, meskipun itu dilakukan oleh pihak swasta, tidak dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, karena bersifat kontraktual. Ini merupakan satu cerminan peradaban bangsa di mata internasional. Jadi negara-negara yang lain itu melihat pelaksanaan konstruksi di Indonesia ini sebenarnya dikategorikan sudah maju, modern, atau masih tertinggal. Itu bisa dilihat pada masa konstruksi atau masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apakah itu Bina Marga, Sumber Daya Air ataukah Cipta Karya.

Yang kita lihat sekarang ini Pak BPSDM, itu sangat memprihatinkan. Pekerjaan jalan ataupun pekerjaan jembatan itu metode pekerjaannya itu masih menggambarkan bahwa ini ditangani dengan satu manajemen yang tidak modern. Peralatan yang dipakai itu bukan peralatan yang *ter-update* secara internasional. Sehingga pekerjaan tersebut sangat lambat, kemudian juga berdampak terhadap kemacetan lalu lintas dan berdampak terhadap kerusakan jalan kabupaten maupun jalan provinsi yang menjadi alternatif sebagai alternatif lalu lintas.

*Nah*, seperti ini, saya memberikan masukan kepada Kepala BPSDM, karena ini terkait dengan peradaban bangsa Indonesia di mata internasional, tolong betul-betul dipetakan oleh BPSDM, apakah perencanaan kita ini memang masih membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, ini perlu di-*upgrade*. Ya kemudian bagaimana terhadap karakter tadi sudah merupakan langkah maju. Karena dia punya pengetahuan tinggi, punya pengalaman

panjang, tapi kalau karakternya *enggak* baik itu juga akan menciptakan kualitas pekerjaan yang tidak bagus juga.

Jadi saya minta kepada BPSDM, betul-betul memetakan, dan penyediaan sumber daya manusia di bidang perencanaan, kemudian di bidang pengawasan, di bidang pelelangan, itu kondisinya sekarang betul-betul dicermati, dibaca. Kemudian ke depa, *roadmap* untuk menyediakan sumber daya manusia yang memadai yang punya nilai kompetisi secara internasional, itu internasional *tuh* maksudnya kualitas pekerjaannya nanti betul-betul bagus, proses pekerjaannya mewujudkan peradaban bangsa.

Jadi saya minta berawal dari situ, saya kira itu, Pimpinan. Saya jadi Pimpinan sementara, karena diperintah Pak Robert. Ya, terima kasih.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr.  
Ir. KHALAWI AH, M.Sc., M.M., IPU):**

Terima kasih, akan kita tindaklanjuti.

**KETUA RAPAT:**

Iya karena tadi saya panggil Pak Hamka, karena Pak Hamka juga ke belakang, ya supaya Pak Dewo jangan *ngomong* dari sana, saya suruh ganti saja di sini, biar Pak Dewo sepakat ya. Iya baik, ada lagi yang *tanggapin*? Cukup ya? Baik.

Kepala BPIW, silakan.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir.  
RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**Pak Pimpinan dan Anggota yang terhormat dan saya banggakan,**

Izin berkomentar terkait beberapa masukan dari Bapak/Ibu semua. Pertama, Ibu Sarce Bandaso masih ada, ini terkait dengan Kabupaten Luwu, Bu, kebetulan Kabupaten Luwu itu masuk ke dalam daerah pengembangan kawasan pertanian nasional, Ibu. Jadi nanti kami sedang meninjau, melihat, kira-kira dukungan PUPR apa yang bisa diberikan kepada Kabupaten Luwu terkait dengan daerah pertanian itu, Ibu. Termasuk nanti di dalam dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah.

Kemudian Pak Tamanuri, izin, Bapak, kawasan pariwisata Pahawang sudah menjadi konsen kita, Bapak. Kita akan melihat terkait dengan satu kesatuan pengembangan wilayah di kawasan Teluk Betung, Bapak. Nanti akan coba lihat apa-apa yang bisa didukung oleh Kementerian PUPR, akan kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait, Bapak.

Pak Willem Wandik, ini biasanya memang teman-teman Direktorat Jenderal terutama Bina Marga akan menyampaikan kepada kami, Pak, pada saat usulan terkait dengan jembatan gantung, Pak. Ini akan kami evaluasi apakah jembatan gantung tersebut *eligible* untuk ditangani oleh kita, Bapak.

Kemudian Pak Roberth Rouw, Pak Pimpinan. Memang kita masih fokus di Jayapura-Wamena, Bapak, dan di Wamena-Nabire, Bapak. Ini terus-terang yang Bapak sampaikan tadi, saya belum tahu betul, Bapak. Izin nanti akan kami komunikasikan dengan teman-teman dari pusat wilayah yang bersangkutan terkait dengan Pepera-Kei dan Dekai ini, Bapak. Tapi yang jelas Bapak, bahwa Papua ini termasuk yang intens kami lakukan survei Bapak, Bapak bisa tanyakan ke balai-balai, bagaimana BPIW ini senantiasa melakukan survei-survei di pegunungan-pegunungan tengah Pak, ya? Kemudian juga di pantai utara dan pantai selatan di Papua, Bapak.

Kemudian terkait dengan alokasi, Bapak, memang kami bisa pahami bahwa Kementerian PUPR sedang mem-*push* pekerjaan-pekerjaan fisik di lapangan, Bapak. Tetapi kami membuat strategi, Bapak, walaupun alokasi turun, kami rubah, Pak, pendekatan kami dari kajian-kajian yang konsultan Pak, menjadi kajian-kajian yang kita lakukan secara swakelola, Bapak. Sehingga kegiatan-kegiatan survei, investigasi lapangan, tetap bisa kami lakukan semaksimal mungkin.

Saya kira itu dari kami, tapi intinya, Bapak, bahwa BPIW sekarang kita ini sedang melaksanakan pembuatan rencana pengembangan infrastruktur wilayah untuk setiap provinsi, Bapak. Jadi nanti kalau tahun ini selesai kami akan sampaikan kepada Bapak/Ibu yang terhormat untuk menjadikan masukkan dari Bapak/Ibu semua, barangkali ada hal-hal yang tertinggal. *Nah* ini akan kami evaluasi terus akan kami revisi secara terus-menerus, Bapak.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

*Wabillahitaufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**F- P. GOLKAR (DRS. HAMKA B. KADY., MS):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Kepala BPIW, saya sedikit.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir.  
RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.):**

Siap, Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Kan sebentar lagi kan kami kemarin sudah ketok, penambahan DOB baru di Papua. Bapak masuk *enggak* di dalam ini, Bapak? Yang provinsi, tiga provinsi.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.):**

Intinya, Bapak, itu pasti masuk Bapak, di kami, Bapak. Jadi walaupun bertambah wilayahnya, *toh* kita, kawasan Papua ini dan Papua Barat ini memang satu kesatuan, Bapak. Jadi pasti akan menjadi konsen kami, Bapak dengan bertambahnya daerah DOB-DOB itu, Bapak.

Terima kasih Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Oke, Pak Hamka?

**F- P. GOLKAR (DRS. HAMKA B. KADY., MS):**

Iya saya tambahkan sedikit, Pak BPIW. Saya sependapat itu dan mendukung. Tolong segera diberi kami, setiap wilayah yang terutama dipil kami, supaya bisa mengetahui dan membantu Bapak di dalam program-program berikutnya, setuju. Kalau bisa dipercepat.

**KETUA RAPAT:**

Baik, demikianlah Saudara-saudara.

Apabila tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibahas, maka sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Pasal 283, kita akan merumuskan kesimpulan atau keputusan RDP pada hari ini, untuk kita sepakati dan kita tanda tangani bersama. Coba kesimpulan, naik, sudah?

**DRAF KESIMPULAN RDP KOMISI V DPR RI  
DENGAN INSPEKTORAT JENDERAL (IRJEN), KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
SENIN, 29 AGUSTUS 2022**

1. Komisi V DPR RI meminta Irjen, BPSDM dan BPIW Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan Anggaran Pendapatan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI di mana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut:

Unit Organisasi:

- Itjen: Realisasi Keuangan = 47,34%, Realisasi Fisik = 49,56%
- BPSDM: Realisasi Keuangan = 55,36%, Realisasi Fisik = 57,39%
- BPIW: Realisasi Keuangan = 44,55%, Realisasi Fisik = 44,57%

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Irjen, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian PUPR mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kerja Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- Itjen  
Pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp90.265.143.000,00  
Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 Rp90.265.143.000,00  
Sama, tidak berubah ya tidak ada selisih ya.
- BPSDM  
Kebutuhan Tahun Anggaran 2023 Rp560.000.000.000,00  
Nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 Rp399.738.585.000,00  
Selisih Rp160.261.415.000,00  
Berarti ada penambahan, *eh* pengurangan ya, kurang ya, selisih 160 ya, dari kebutuhan.
- BPIW  
Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2023 Rp257.359.560.000,00  
Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.755.918.000,00  
Ada selisih anggaran Rp116.603.642.000,00

3. Komisi V DPR RI, dan Irjen, BPSDM, dan BPIW Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukkan serta usulan Komisi V DPR RI. Jadi ini prioritasnya ya.

4. Komisi V DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR agar meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan secara lebih ketat dan detail di setiap unit Eselon I untuk mengantisipasi adanya potensi kerugian negara.

5. Komisi V DPR RI meminta BPIW Kementerian PUPR agar melakukan kajian terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan saran dan usulan Komisi V DPR RI.

6. Komisi V DPR RI meminta BPSDM untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh daerah demi terwujudnya pemerataan, peningkatan sumber daya manusia di bidang infrastruktur.

Anggota *gimana*? Setuju? Anggota setuju?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Oke. Mitra?

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Izin, Bapak Pimpinan, yang nomor tiga, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tiga, oke.

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Usul Pak, "Komisi V DPR RI bersama", Pak, Irjen, bukan "dan", dua kali nanti ada, Pak

**KETUA RAPAT:**

Oke, iya, iya.

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

*Makasih*, Pak.

**KETUA RAPAT:**

*Makasih*, oke. Jadi setuju ya? Oke.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik,

**Saudara-saudara yang kami hormati,**

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan.

Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan.

Sebelum rangkaian acara rapat ini kami tutup, kami berikan kesempatan kepada salah satu Eselon I Kementerian PUPR untuk menyampaikan sambutan penutup. Silakan Pak.

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):**

Baik, terima kasih.

**Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat dan kami hormati,**

Apa yang menjadi kesimpulan tadi akan kita tindaklanjuti, Pak. Dan apa masukan dan arahan akan, kami sepakat untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu semua.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan, maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**(KETOK PALU 3 KALI)  
(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 15.25 WIB)**

**Jakarta, 29 Agustus 2022**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
**NIP. 196912021998032002**